

**ANALISIS PENEMPATAN GURU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
HAYATUR RIZA
NIM. 150802064**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hayatur Riza
NIM : 150802064
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Kap.Aie/12 Agustus 1997
Alamat : Ameria Bahagia

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juli 2020



Hayatur Riza
NIM. 150802064

**ANALISIS PENEMPATAN GURU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

HAYATUR RIZA

NIM. 150802064

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dra. Tasnim Idris, M.Ag

NIP. 195912181991032002


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 2017117904

**ANALISIS PENEMPATAN GURU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SIMEULUE**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2020
7 Muharram 1442 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dra. Tasnim Idris, MA.
NIP. 195912181991032002

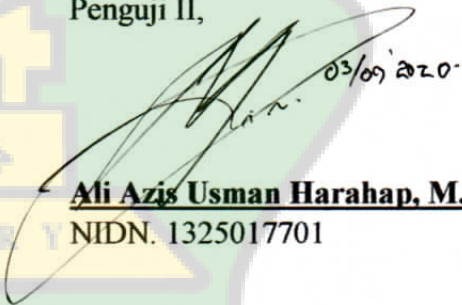
Sekretaris,


Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

Penguji I.


Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Ali Azis Usman Harahap, M.M.
NIDN. 1325017701

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Guru adalah elemen pertama yang wajib dalam pendidikan. Maju atau tidaknya suatu pendidikan diukur dari bagaimana kualitas dan kuantitas gurunya. Disamping itu pemerintah telah mengatur hak guru yang merupakan tenaga profesional, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perbaikan tata kelola guru. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan serta ketidakmerataan penempatan guru ini adalah karena letak geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan), selain itu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya formasi penempatan guru di Kabupaten Simeulue juga menjadi penyebab. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penempatan guru dan bagaimana upaya Dinas Pendidikan Simeulue dalam mengatasi permasalahan pemerataan penempatan Guru Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penempatan guru dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat kekurangan guru di Kabupaten Simeulue. Mekanisme penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue mengacu kepada pasal 59 PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru sebelum sepenuhnya terlaksana secara optimal di Kabupaten Simeulue. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penempatan dan pemerataan guru yaitu: Melakukan pemetaan terhadap jumlah sekolah dan jumlah guru yang tersedia, merekrut guru-guru kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan mensejahterakan mereka dengan layak, memberikan kemudahan bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil, memperbarui program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T, memperkuat Undang-Undang mengenai penempatan dan pemerataan guru dan memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar serta bekerjasama dan ikut melibatkan semua pihak terkait.

Kata Kunci: Pendidikan, Guru, Penempatan dan Pemerataan Guru

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: Analisis Penempatan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kami haturkan kepada junjungan terbaik baginda Rosul Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasasallam selaku tauladan terbaik hingga akhir zaman. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, serta kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua, Ayahanda Rasmidin, S.Pd dan Ibunda Sitti Amra yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang terbaiknya, juga kepada suami dan anak tercinta Ferdi Kurniawan dan Syaqla yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Kepada Abang, kakak dan adik tersayang yaitu Amda Resdiar, S.P., M.Si, Dwi Restika, S.Pd, dan Muhammad Arif Rayyan yang juga telah memberikan semangat, dukungan serta do'a yang sangat berarti bagi peneliti. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Tasnim Idris, MA. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Cut Zamharira, S.IP., M.AP. selaku dosen Pembimbing Kedua dan anggota yang sudah sangat banyak membimbing dan memberikan saran untuk peneliti.

4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing dan membina penulis selama masa perkuliahan.
5. Eka Januar, M.Soc.Sc sebagai Ketua Jurusan dan Siti Nur Zalikha, M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah mencurahkan seluruh ilmunya yang sangat bermanfaat dalam kehidupan peneliti.
7. Staf administrasi Program Studi, Mahzan, S.Pdi yang telah banyak membantu dalam pengurusan Administrasi.
8. Kepada Kepala Dinas dan Staff Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Kemudian kepada para pustakawan yang telah memberikan pelayanan untuk memperoleh referensi yang sesuai dengan penulisan ini.
9. Kepada teman-teman Yosi Febriwita, Citra Dewi Maysarah, Afrasyaru Jolen Lestari yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, serta kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015.
10. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya kepada peneliti.

Akhirnya atas segala kekurangan dari skripsi ini, sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Darussalam, 12 Juli 2020
Peneliti,

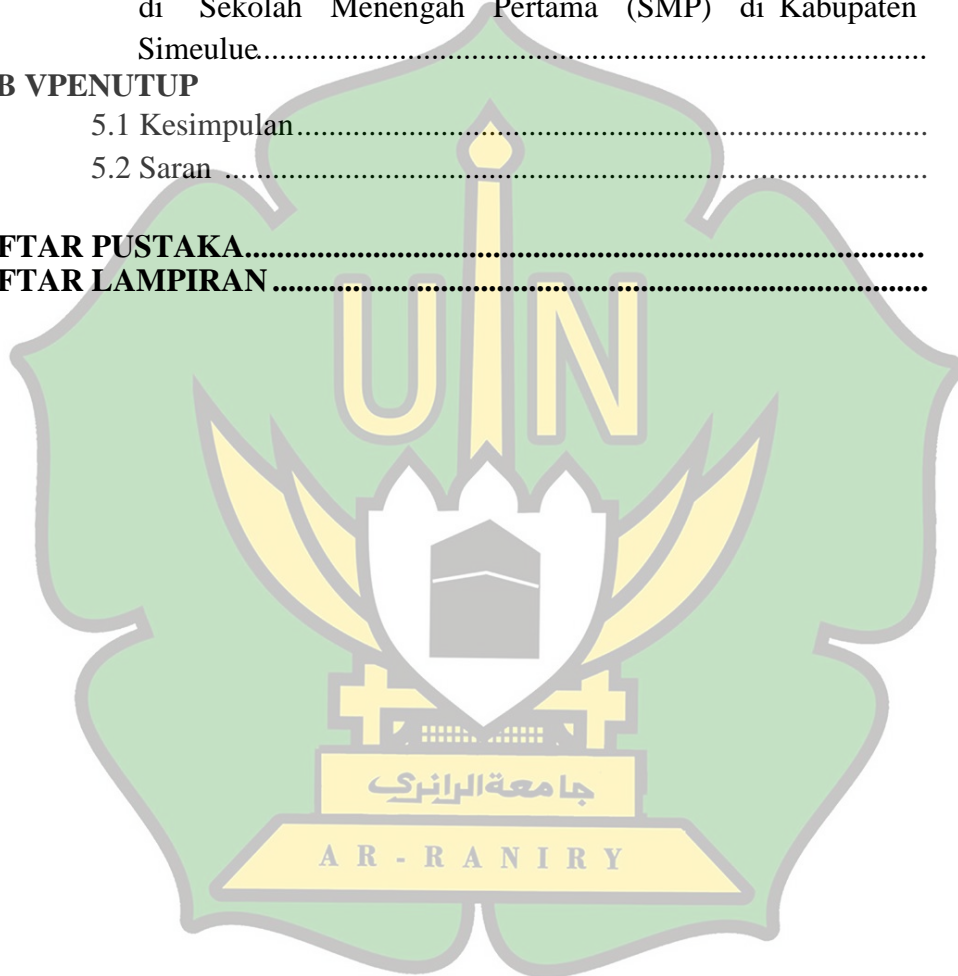


Hayatur Riza
NIM. 150802064

DAFTAR ISI

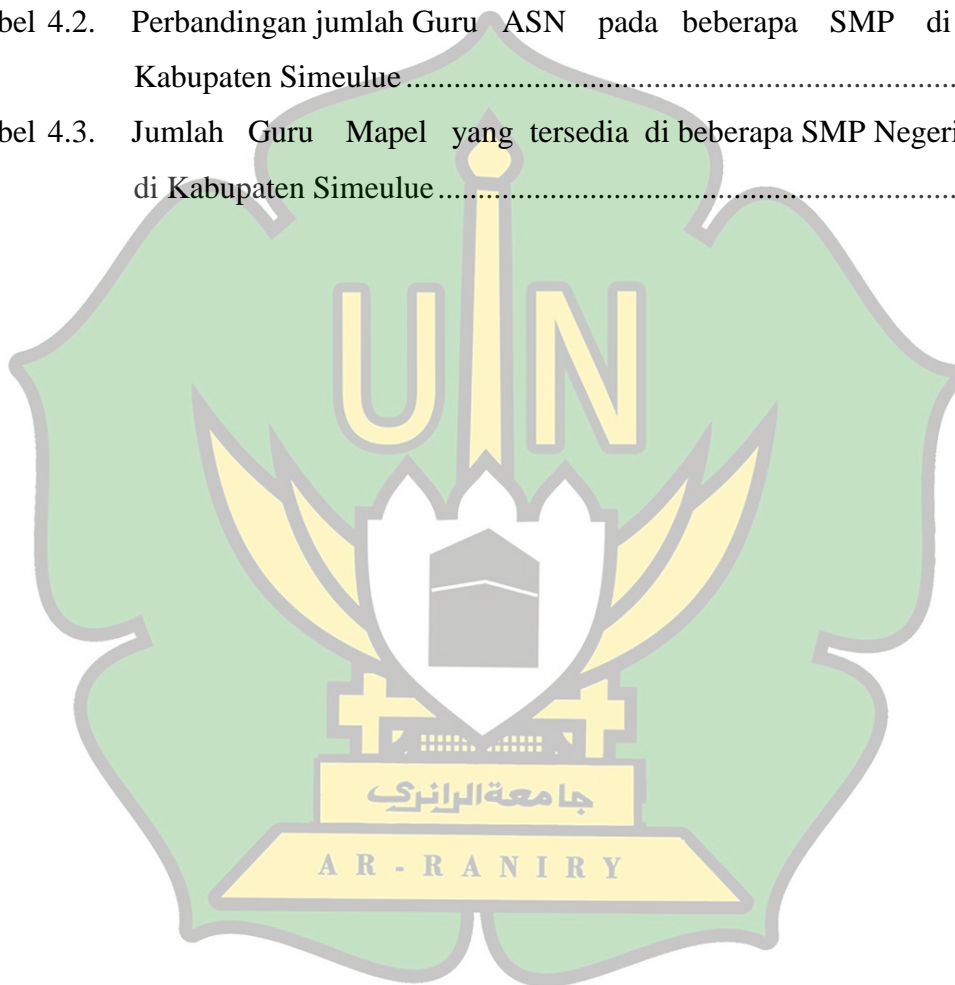
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penelitian Terdahulu	7
1.6 Penjelasan Istilah	8
1.7 Metode Penelitian	9
1.7.1 Pendekatan Penelitian	9
1.7.2 Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	10
1.7.3 Lokasi Penelitian	11
1.7.4 Jenis dan Sumber Data	12
1.7.5 Informan Penelitian	13
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.7 Teknik Analisis Data	17
1.7.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Pendidikan	19
2.2 Teori Kepemimpinan	24
2.3 Teori Sumber Daya Manusia	26
2.4 Teori Organisasi	28
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1 Kondisi Geografis Daerah	32
3.2 Demografi	33
3.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	34
3.3.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	34
3.3.2 Persentase Penduduk Miskin	35

3.3.3 Pendidikan	36
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Mekanisme Penempatan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue	49
4.2 Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam Mengatasi Permasalahan Penempatan dan Pemerataan Guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue.....	54
BAB VPENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Guru pada SMP di Kabupaten Simeulue.....	4
Tabel 1.2.	Perbandingan Jumlah Guru ASN pada beberapa SMP di Kabupaten Simeulue	4
Tabel 1.3.	Informan Penelitian.....	13
Tabel 4.1.	Jumlah Ketersediaan, Kebutuhan, dan Kekurangan Guru pada tingkat SMP di Kabupaten Simeulue	41
Tabel 4.2.	Perbandingan jumlah Guru ASN pada beberapa SMP di Kabupaten Simeulue	42
Tabel 4.3.	Jumlah Guru Mapel yang tersedia di beberapa SMP Negeri di Kabupaten Simeulue.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Lampiran II : Daftar Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris Kabupaten Simeulue
- Lampiran III : Daftar Wawancara dengan Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue
- Lampiran IV : Daftar Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue
- Lampiran V : Daftar Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru di beberapa SMPN di Kabupaten Simeulue
- Lampiran VI : Daftar Wawancara dengan beberapa siswa SMPN di Kabupaten Simeulue
- Lampiran VII : SK Skripsi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- Lampiran VIII: Surat Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Lampiran IX : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Lampiran X : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SMPN 1 Simeulue Timur
- Lampiran XI : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SMPN 1 Teupah Tengah
- Lampiran XII : Dokumentasi Penelitian..



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan untuk setiap orang menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk wajib mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang bermutu untuk memenuhi hak warga negaranya.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam pendidikan terdapat dua subjek pokok yang saling berinteraksi. Kedua subjek itu adalah guru dan murid. Guru menjadi persoalan utama dalam pendidikan. Maju tidaknya suatu pendidikan, diukur dari bagaimana kualitas gurunya. Namun demikian, permasalahan mengenai guru ini masih menjadi masalah yang belum dapat terpecahkan, salah satunya adalah masalah masih terdapat wilayah yang kelebihan atau kekurangan pendidik (guru). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, disebutkan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas, dan untuk mewujudkan profesionalitas guru, diperlukan perbaikan tata kelola guru.¹

1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Mutu pendidikan di Indonesia pada saat ini masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari isu tentang ketidakseimbangan ketersediaan guru di sekolah, baik sebagai guru kelas, maupun guru mata pelajaran yang masih menjadi permasalahan di Indonesia, dan belum ada solusi yang konkrit mulai pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Padahal, berdasarkan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru disebutkan bahwa Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antar kabupaten atau antarkota, dan antar provinsi, termasuk kebutuhan Guru di daerah khusus. Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan/atau penempatan Guru dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

Salah satu daerah di Indonesia yang tingkat kualitas pendidikannya masih rendah adalah Aceh. Aceh masih menghadapi permasalahan dengan penempatan dan pemerataan guru. Saat ini banyaknya pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur tetapi mengesampingkan pembangunan mutu pendidikan. Akibatnya, fasilitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di sebagian sekolah di Provinsi Aceh sangat memadai tapi mutu pendidiknya sangat kurang. Kurang meratanya distribusi guru menurut mata pelajaran (mapel) ke seluruh pelosok daerah Provinsi Aceh juga menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di daerah Aceh saat ini, di samping rendahnya kualitas guru itu sendiri. Perekrutan guru sudah sangat banyak di daerah Provinsi Aceh, tetapi hanya bertumpuk di perkotaan, baik itu di ibukota

provinsi dan ibukota kabupaten, sementara di daerah pedalaman mengalami kekurangan guru.²

Salah satu daerah di Provinsi Aceh yang masih menghadapi permasalahan besar dengan kurangnya guru adalah di Kabupaten Simeulue. Menurut observasi awal peneliti di Dinas Pendidikan Simeulue, pemetaan guru dalam rangka pendidikan berkeadilan, belum berjalan dengan maksimal. Menurut keterangan di dinas pendidikan Kabupaten Simeulue bahwa masih ada guru yang bertumpuk pada satu sekolah tertentu namun dalam hal ini sudah mulai diupayakan untuk dilakukan pemerataan terutama pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Ketersediaan guru di setiap sekolah (terutama SD dan SMP) belum terpenuhi yang disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya karena kebijakan pemerintah pusat dalam penempatan guru di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan lemahnya manajemen data, informasi serta lemahnya pengendalian internal terhadap penetapan dan pendistribusian guru. Sehingga perlu di tingkatkan lagi dari segi kedisiplinan dan keadilan supaya terealisasikan pendidikan yang berkualitas dengan meminimalisir jumlah kekurangan guru, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan bahwa di Kabupaten Simeulue terdapat kekurangan guru pada Sekolah Mengengah Pertama

2 Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh (diakses di Bappeda.acehprov.go.id pada tanggal 8 Februari 2020)

(SMP).Data jumlah guru padatingkat SMP di Kabupaten Simeulue peneliti sajikan dalam tabel dibawah ini:³

Tabel 1.1
Jumlah Guru pada SMP di Kabupaten Simeulue

No	Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Guru yang Ideal
1	SMP	46 Sekolah	4.616 Siswa	227GuruASN	532 Guru ASN

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2019

Dari data awal yang peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sebanyak 305 jumlah kekurangan guru pada tingkat sekolah SMP di Kabupaten Simeulue. bahkan guru Bimbingan Konseling (BK) hampir sama sekali tidak tersedia dan tidak terdata dalam kebutuhan guru yang ideal. Terdapat kesenjangan pemerataan penempatan guru, antara sekolah yang berada di perkotaan (ibukota kabupaten) dan sekolah yang berada di pedesaan. Hal ini berdasarkan observasi awal peneliti pada dinas pendidikan Kabupaten Simeulue yang akan peneliti sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Guru ASN pada SMP di Kabupaten Simeulue

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru ASN
1	SMPN 2 Simeulue Timur	19 (sembilan belas) orang
2	SMPN 1 Teupah Tengah	9 (Sembilan) orang
3	SMPN 1 Alafan	4 (empat) orang

Sumber :Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2019

Berdasarkan data diatas penelitimenyimpulkan bahwa penempatan guru di KabupatenSimeulue belum merata, masih banyak guru yang bertumpuk pada sekolah-sekolahtertentu sehingga perlu dilakukan mutasi ketempat yang kekurangan guru agar bisa membentuk pendidikan yang berkeadilan.

³ Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “Analisis Penempatan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue” yang aktivitas penelitiannya berorientasi pada kebijakan penempatan guru di beberapa SMP Negeri di Kabupaten Simeulue yakni SMPN 2 Simeulue Timur, SMPN 1 Teupah Tengah dan SMPN 1 Alafan.

1.2. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanamekanisme penempatan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana upaya dinas pendidikan simeulue dalam mengatasi permasalahan pemerataan penempatan guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penempatan guru SMP di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dinas pendidikan simeulue dalam mengatasi permasalahan pemerataan penempatan guru di SMP di Kabupaten Simeulue.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam bidang akademis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat memperoleh pengetahuan tentang kondisi pelayanan masyarakat terutama di bidang pendidikan baik terhadap peneliti maupun para pembaca.
- b. Bagi pengembangan keilmuan, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding maupun bahan rujukan atau dasar pijakan bagi penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti. Dengan terungkapnya hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri, serta wawasan dan pengalaman.
- b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue. Dengan terungkapnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi peningkatan kualitas pelayanan dibidang pendidikan dalam masyarakat.

1.5. Penelitian Terdahulu

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Dengan kajian pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas.

Terkait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis peroleh beberapa kajian sebelumnya, di antaranya:

1. Muhammad Abdullah (2018) dengan judul penelitian "*Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru PNS Pada Jenjang SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul*".⁴ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan kajian yang ingin diteliti adalah, penelitian ini fokus melihat permasalahan penataan dan pemerataan guru PNS pada jenjang SD (Sekolah Dasar), sedangkan kajian yang ingin diteliti oleh penulis adalah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, yang mana pada penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian yang ingin dilakukan penulis di Kabupaten Simeulue.
2. Desi Ratnasari Dkk (2018) dengan judul penelitian "*Implementasi Pemerataan Guru PNS Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Jenjang Sekolah Dasar)*." Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus pada mekanisme penempatan dan pemerataan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Selain itu, lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Batam. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan

4 Muhammad Abdullah (2018). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru PNS Pada Jenjang SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Skripsi Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

metode Deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.⁵

3. Citra Dewi (2018) dengan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru (Studi Kasus pada SMK di Kabupaten Bengkulu Utara).*”⁶ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus pada mekanisme penempatan dan pemerataan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SLTA sederajat). Selain itu, lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengerjakan suatu hal yang baru dapat disebut juga sebagai guru.
2. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian.

5 Desi Ratnasari Dkk (2018) dengan judul penelitian “ Implementasi Pemerataan Guru PNS di Kota Batam (Studi Kasus Pada Jenjang Sekolah Dasar). Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

6 Dewi, Citra. (2018) Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Indonesian Journal of Education and Learning Volume 1 Nomor 2 April 2018. DOI: 10.31002/ijel.v1i2.649

Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

3. Penempatan adalah tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan.
4. Pemerataan guru adalah proses pembangunan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pengadaan tenaga pengajar dalam bidang pendidikan.
5. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan menuntut proses yang menjelaskan secara umum objek penelitian. Penjelasan tersebut didapat dari data-data autentik yang kemudian dianalisis dan ditinjau kesesuaiannya dengan kerangka teori.

⁷ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁸ Menurut Sugiyono Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹

1.7.2 Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena di dalam lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit. Disamping itu juga fokus penelitian merupakan batas ranah dalam pengembangan penelitian, supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Bagaimana mekanisme serta pelaksanaan kebijakan penempatan guru SMP di Kabupaten Simeulue baik yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dibidang pendidikan maupun kepala sekolah dan guru-guru.

8 Narwawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.29.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam menyelesaikan permasalahan pemeratan guru SMP.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simeulue. Latar belakang dipilihnya Kabupaten Simeulue sebagai lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah di Aceh yang menghadapi permasalahan dengan kurangnya guru, terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dimana, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdapat 46 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 4.616 siswa yang tersebar di 10 kecamatan. Guru yang tersedia ditahun 2019 yaitu sebanyak 227 guru. Sehingga idealnya kebutuhan guru tingkat SMP dengan jumlah murid sebanyak 4.616. siswa yaitu sebanyak 532 guru.¹⁰ Hal ini juga diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Simeulue (Kadis), H. Rasmidin, S.Pd(2019) sehingga telah dibuka penerimaan tenaga kontrak guruguna untuk memenuhi sejumlah kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah yang ada di Simeulue. Sebab ada beberapasekolah sangat kurang tenaga pengajarnya, saat ini Simeulue kekurangan guru mencapai 600 orang.¹¹

10 Dapodik Kabupaten Simeulue

11 Penerimaan PNS Kontrak di Simeulue diakses di <https://modusaceh.co/news/penerimaan-pns-kontrak-di-simeulue-tak-ada-titipan-apalagi-siluman/index.html> pada tanggal 25 Februari 2020

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹² Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yakni, Dinas pendidikan Kabupaten Simeulue, Sekretaris, Kepala bidang Guru Tenaga Kependidikan, Kepala bidang Pendidikan Dasar, Kepala sekolah/guru, serta siswa-siswi SMP di Kabupaten Simeulue. Data primer juga berupa dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.¹³ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penempatan Guru SMP di Kabupaten Simeulue.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.¹⁴ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

12 Burhan, Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,..., h. 132.

13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 78.

14 Ibid. 132.

1.7.5 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Analisis Penempatan Guru SMP di Kabupaten Simeulue dengan memilih orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada saat penelitian suatu objek tertentu yang terjadi dilapangan. Dengan demikian dalam melakukan pemilihan informan penelitian secara keseluruhan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut para informan yang akan di wawancarai:

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Sekolah SMP a. Kepala Sekolah SMPN 2 Simeulue Timur b. Kepala Sekolah SMPN 1 Teupah Tengah c. Kepala Sekolah SMPN 1 Alafan	3 (tiga) Orang
2	Kepala bidang Guru Tenaga Kependidikan (Kabid GTK)	1 (Satu) Orang
3	Guru SMP	3 (tiga) orang
Total		7 (Tujuh) Orang

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun, 2020.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.¹⁵ Pembahasan penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif yaitu menjelaskan dan menganalisa pokok-pokok persoalan yang sedang berlaku dan menginter prestasikan kondisi-kondisi riil yang sedang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini

15 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 133

penulis menggunakan langkah-langkah teknik dalam rancangan penelitian sebagai berikut:¹⁶

1. Observasi Langsung

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan penelitian secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan serta rekaman gambar”.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi, yang mana berdasarkan observasi awal penulis di Dinas Pendidikan Simeulue, pemetaan guru dalam rangka pendidikan berkeadilan, belum berjalan dengan maksimal. Menurut Krisyantono, observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek agar dapat melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh objek tersebut.¹⁸ Observasi merupakan metode untuk menjelaskan dan merinci gejala-gejala yang terjadi, Menurut Nasution dalam Sugiyono bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Pada dasarnya para ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasar data yang dapat diobservasi untuk mengetahui fakta-fakta yang berupa data dan informasi melalui suatu pengamatan atau observasi. Peneliti melakukan observasi ke beberapa SMP di Kabupaten Simeulue, termasuk Dinas Pendidikan dan jajarannya.¹⁹

16 M. Yatim Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 84-88

17 Sutupo, H. B. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret University Press hal.64 Diakses 19 Juni 2020

18 Krisyantono. Metode Penelitian (2006, h.110)

19 Sugiyono, (2010). “ Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertatap muka secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada informan muka langsung menggunakan *indepth interview* yaitu dimana pelaksanaannya lebih bebas.²⁰ Wawancara merupakan percakapan yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dengan *key informan* sehingga memperoleh data yang mendalam dan maksimal mengenai penelitian yang dilakukan. Di dalam kegiatan melakukan penelitian dapat dilakukan beberapa jenis wawancara misalnya, wawancara pendahuluan, wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam. Penulis dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dan data yang dalam. Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data atau informasi secara langsung dengan informan yang dilakukan dengan frekuensi tinggi secara intensif. Dapat disimpulkan bahwa penulis melakukan wawancara mendalam agar mendapatkan informasi secara langsung dari sumber yang dinilai sangat penting untuk mendapatkan data dan informasi bagi keperluan penelitian penulis.²¹

3. Analisa Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumentasi merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumentasi yang digunakan dalam

20 *Ibid*, Hal 329

21 Analisis Komunikasi..., Steven Saut Martua, FIKOM UMN, 2016

penelitian ini adalah berupa informasi, disimpan atau di dokumentasikan seperti dokumen, data *softfile*, data otentik, foto dan arsip lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data primer yang berasal dari Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah SMP di Kabupaten Simeulue, serta berbagai data sekunder/pendukung dari media cetak maupun elektronik. Penelitian terhadap isi berita ini bersifat kualitatif, oleh karena itu sampel penelitian diambil sesuai dengan pertimbangan kebutuhan peneliti.²²

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer yang telah di dapatkan oleh peneliti. Studi pustaka adalah teknik untuk melakukan pengumpulan data dimana untuk menelaah buku buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan juga merupakan langkah yang sangat penting bagi seseorang yang akan menetapkan topik penelitian, dimana langkah selanjutnya adalah melakukan kajian-kajian terhadap teoriteori yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan

22 Press Release Biro Humas dan Protokol serta pemberitaan SKH Radar Lampung periode Januari - Februari tahun 2015 (digilib.unila.ac.id)

model analisis interaktif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.²³
2. Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.²⁴
3. Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.²⁵

23 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173-174

24 Ibid, h. 174

25 Ibid, h. 177

1.7.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confimality*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan memiliki pengaruh besar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jika manajemen tidak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka suatu proses dalam pendidikan itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Sejalan dengan perkembangan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, manajemen tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran dan manajemen yang baik dalam pengambilan kebijakan disetiap sekolah. Dengan demikian sebagaimana Daryanto (2012: 170) menyebutkan bahwa “Pendidikan ialah bantuan yang diberikan kepada personal pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih baik dan upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan”. sebagaimana pandangan Wibowo (2014: 1) bahwa:

Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota serta sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan jelas.

Dalam arti lain manajemen adalah suatu pencapaian tujuan organisasional, memimpin dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian dan lainnya. Dengan adanya manajemen yang baik dalam pendidikan maka akan membangun suatu manajemen kinerja dalam pendidikan itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya pendidikan yang berkualitas

akantercapai, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Simeulue.

Guru secara etimologi berarti orang yang mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian atau profesi mengajar. Dalam bahasa Inggris, guru berasal dari kata *teach (teacher)*, yang memiliki arti sederhana *person who occupation is teaching others* yang artinya guru adalah seorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²⁷

Dalam konteks manajemen pendidikan, terdapat pendidik dan yang dididik atau guru dan murid. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang menunjukkan profesi ini seperti *mudarris*, *mu'allim* dan *mu'addib* yang meski memiliki makna yang sama, namun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Di samping kata-kata tersebut juga sering digunakan kata-kata *ustadz* atau *syaikh*.²⁸

Derajat dan tempat bagi guru dalam Islam sangat tinggi. Sebab mereka termasuk kedalam golongan orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Betapa pentingnya menuntut ilmu dalam Islam, Bahkan ketika sedang kondisi peperangan, sebagian kaum muslimin dianjurkan untuk tidak ikut berjihad dan tetap fokus dalam pendidikan. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran:

26 Mursidin. Profesionalisme Guru Menurut Al-Quran, Hadist dan Ahli Pendidikan Islam, (Jakarta: penerbit Sedaun Anggota IKAPI, 2001), hal. 7

27 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

28 Khusnul Wardan (2019). Guru Sebagai Profesi. Deepublish: Yogyakarta, ISBN 978-623-209-539-7, h. 108

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya (QS. At-Taubah:122)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting, bahkan dalam situasi genting seperti peperangan. Dalam ayat ini juga diajarkan keadilan, artinya tidak semua orang harus pergi berperang, melainkan harus ada pula sebagian yang tinggal untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama agar dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik lagi. Begitu pula dalam permasalahan kurangnya guru di beberapa sekolah yang banyak terjadi, seharusnya tercipta keadilan bagaimana mekanisme penempatan guru yang ideal, baik itu penempatan guru diperkotaan maupun di pedesaan (pedalaman) karna menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan merupakan pemimpin, dalam hal ini diberatkan kepada Dinas Pendidikan, karna ditangan nya lah segala permasalahan dan kebijakan mengenai pendidikan diputuskan. Dalam beberapa hadits disebutkan “*Jadilah engkau sebagai guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pencinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga kamu menjadi rusak*”. Dalam hadis Nabi yang lain: “*Tinta para ulama lebih tinggi nilainya daripada darah para shuhada*”. (H.R Abu Daud dan Turmizi).Rasulullah

SAW juga bersabda: “*Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengamalkanya*”. (H.R. Bukhari)²⁹

Firman Allah dan sabda Rasul tersebut menggambarkan tingginya kedudukan orang yang mempunyai Ilmu Pengetahuan (pendidik). Hal ini beralasan bahwa dengan pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk selalu berpikir dan menganalisa hakikat semua fenomena yang ada pada alam, sehingga mampu membawa manusia semakin dekat dengan Allah SWT. Kemampuan yang ada pada manusia terlahirlah teori-teori untuk kemaslahatan manusia.

Menurut Al-Ghazali pendidik merupakan *maslikhul kabir*. Kedudukan guru dalam pendidikan Islam ialah orang yang memikul tanggung jawab membimbing. Selain sebagai pembimbing dan pemberi arah dalam pendidikan, pendidik juga berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar-mengajar, yaitu berupa teraktualisasinya sifat-sifat illahi dan mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik guna mengimbangi kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.³⁰ Dengan demikian jelas bahwa pendidik (guru) adalah pembentuk sifat-sifat lahiriyah dan memberdayakan potensi yang ada pada muridnya. Ia juga berkesimpulan bahwa pendidik disebut sebagai orang-orang besar (*great individual*) yang aktivitasnya lebih baik dari pada ibadah setahun berdasarkan analisisnya dari hadis-hadis Nabi yang telah

29 Sosok Hebat Guru diakses di <https://zamzamsyifa.sch.id/sosok-hebat-guru-zamzam-syifa/> pada tanggal 07 April 2020

30 Rijal Sabri. Karakteristik Pendidik Ideal dalam Tinjauan Alquran (2017) ISSN 2548 - 2203 Sabilarrasyad Volume II Nomor 01 Januari – Juni 2017 (hal 11)

dipelajarinya.³¹Oleh karena itu pendidik (guru) merupakan orang yang penting untuk dihormati.

Menurut Ramaliyus dalam Khusnul Wardan (2019), secara terminologis, guru sering diartikan sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi (fitrah) siswa, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotorik. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir dalam Khusnul Wirdan (2019) yang menyebutkan bahwa“Guru merupakan orang dewasa yang bertanggungjawab memberikan pertolongan pada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan maupun berdiri sendiri memenuhi makhluk sosial dan sebagai makhluk individual yang mandiri”.³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.Guru atau pendidik mencakup semua elemen yang ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam bab 1 ayat 6: “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”³³Selanjutnya dalam bab XI pasal 39 dinyatakan bahwa “Pendidik (guru) adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

31 Memuliakan Guru. diakses di <https://media.alkhairaat.id/muliakan-guru/> pada 28 Mar 2020
32 Khusnul Wardan (2019). Guru Sebagai Profesi. Deepublish: Yogyakarta, ISBN 978-623-209-539-7, h. 108
33 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”³⁴

Secara normatif guru adalah mereka yang bekerja di sekolah atau madrasah, mengajar, membimbing, melatih para siswa agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.³⁵ Guru merupakan sebuah jabatan profesi, karena untuk menjadi guru diperlukan suatu kemampuan dan keahlian khusus seperti kemampuan mengajar, mengelola kelas, dan sebagainya. Dalam artikel *The Limit of Teaching Profession* bahwa profesi guru termasuk ke dalam profesi khusus selain dokter, penasehat hukum dan pastur. Dalam hal ini, kekhususan seorang guru adalah tugas guru yang memberikan pelayanan pendidikan kepada sesama manusia yang memerlukan dedikasi dan komitmen yang tinggi.³⁶ Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”³⁷

Melihat betapa pentingnya peranan guru dalam mencerdaskan bangsa demi memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu ditinjau kembali bagaimana keberadaan, penempatan dan

34 *Ibid*,

35 *Ibid*, h. 109

36 Khusnul Wardan (2019). Guru Sebagai Profesi. Deepublish: Yogyakarta, ISBN 978-623-209-539-7

37 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

pemerataan guru, tidak hanya di kota-kota saja, akan tetapi diseluruh pelosok negeri, agar pendidikan yang berkualitas pun akan terlaksana dengan maksimal.

2.2. Teori Kepemimpinan

Pada dasarnya secara teoritis, kepemimpinan sebagai suatu ilmu yang menelusuri secara komprehensif (segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas) tentang pola mempengaruhi, mengarahkan dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perencanaan organisasi. Sejalan dengan itu, kepemimpinan semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Sehingga untuk memahami secara prosedural pemahaman kepemimpinan secara lebih dalam, maka kepemimpinan sebagaimana diuraikan oleh Robbins (2016: 68) bahwa “Suatu kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan.” Selain itu Griffin dalam Fahmi (2016: 68) menyebutkan bahwa “Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan.

Konsep kepemimpinan merupakan komponen fundamental di dalam menganalisis proses dan dinamika di dalam organisasi. Untuk itu banyak kajian dan diskusi yang membahas definisi kepemimpinan yang justru membingungkan. Menurut Katz dan Kahn (dalam Watkin, 1992) menyebutkan bahwa “Kepemimpinan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yakni sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku”.

Selanjutnya contoh pengertian kepemimpinan sebagai karakteristik seseorang, terutama dikaitkan dengan sebutan pemimpin, seperti dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2000) bahwa “Leaders are agents of change, persons whose act affect other people more than other people’s acts affect them”, atau pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Proses tersebut bertujuan memotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan ketiga kategori pengertian di atas, Watkins (1992) mengemukakan bahwa “kepemimpinan berkaitan dengan anggota yang memiliki kekhasan dari suatu kelompok yang dapat dibedakan secara positif dari anggota lainnya baik dalam perilaku, karakteristik pribadi, pemikiran, atau struktur kelompok”. Pengertian ini tampak berusaha memadukan ketiga kategori pemikiran secara komprehensif karena dalam definisi kepemimpinan tersebut tercakup karakteristik pribadi, perilaku, dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok.³⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka teori kepemimpinan pada dasarnya merupakan kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik, mental, dan kedudukan yang dipandang lebih daripada individu lain dalam suatu kelompok sehingga individu yang bersangkutan dapat mempengaruhi individu lain dalam kelompok tersebut untuk bertindak ke arah pencapaian suatu tujuan.

38 Udik Budi Wibowo (2011): Teori Kepemimpinan (BKD Kota Yogyakarta, h. 14

2.3. Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi pemerintahan, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi.³⁹

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.⁴⁰ Secara lebih khusus SDM dalam arti mikro di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari tiga sudut:

1. SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi yang dapat dihitung jumlahnya.
2. SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi.
3. Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai penggerak organisasi berbeda dengan sumber daya lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya mengharuskan

39 Kalangi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 2 Nomor 1, (Sulawesi Utara: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015), h. 1

40 Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 172

sumber daya manusia diperlakukan secara berlainan dengan sumber daya lainnya.⁴¹

Berdasarkan keterangan di atas sumber daya menunjukkan bahwa dalam bekerja di lingkungan sebuah pemerintahan harus diperlakukan dengan kualitas kehidupan kerja yang baik agar memungkinkannya bekerja secara efektif, efisien, produktif dan berkualitas. Di antaranya dalam bentuk memberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengembangkan karirnya, diperlakukan adil dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, disupervisi secara jujur dan obyektif, memperoleh upah yang layak dan lain lain.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Indikator kualitas Sumber Daya Manusia menurut Notoatmodjo yaitu: pendidikan dan pelatihan.⁴³ Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan yaitu suatu proses yang dimana tujuannya untuk mengembangkan baik kemampuan, keterampilan atau perilaku. Sedangkan indikator kualitas Sumber Daya Manusia menurut Hutapea dan Nurianna adalah memahami bidangnya masing-masing, pengetahuan, kemampuan, semangat kerja dan kemampuan perencanaan/ pengorganisasian.⁴⁴ Dengan demikian jelas SDM itu adalah individu yang

41 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia...h. 76

42 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), h. 56

43 Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 16

44 Hutapea dan Nurianna, Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 56

memiliki pengetahuan yang tinggi dengan kemampuan mengelola sebuah organisasi.

2.4. Teori Organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang memiliki struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan sadar dan di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sama dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinir dan kooperatif serta dorongan-dorongan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁵ Organisasi menurut Beach ialah sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi, dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antar anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau bawahan.⁴⁶

Adapun penjelasan dari pengertian organisasi di atas adalah pertama, 'entitas sosial' merujuk kepada organisasi sebagai suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Kedua, 'secara sadar terkoordinasi' merujuk kepada administrasi atau pengelolaan organisasi. Ketiga, 'suatu batas relatif teridentifikasi' menunjukkan adanya batas pemisah atau pembeda antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi. Keempat, 'berfungsi secara relatif berkesinambungan' menunjukkan bahwa organisasi bukan kelompok orang-orang yang berinteraksi secara sementara,

45 Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 20

46 Beach. Making The Right Decision Organizational Culture, Vision and Planning (United States of America : Prentice-Hall Inc, 2010) h. 11

temporer, atau terputus-putus, melainkan berinteraksi secara reguler dan tetap dalam jangka waktu yang relatif lama.

Adapun unsur-unsur organisasi menurut Wursanto terdiri dari: (1) *man* (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil. (2) kerjasama, yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, (3) Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai serta mendeskripsikan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan, (4) peralatan, terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah/gedung/bangunan/kantor), (5) lingkungan (*environment*), (6) kekayaan alam, dan (7) kerangka mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.⁴⁷

Beberapa teori organisasi perspektif dan sekelompok prinsip-prinsip pengorganisasian telah dikemukakan oleh orang-orang dari berbagai negara pada permulaan separuh abad ini, yakni “Manajemen Ilmiah” (Taylor, 1911), “Organisasi Birokrasi” (Weber, 1947), dan “Manajemen Administratif” (Fayol, 1929; Mooney and Reiley, 1929, Urwick, 1940). Teori-teori yang direkomendasikan oleh masing-masing teoritis organisasi tersebut agak berbeda, tetapi terdapat persamaan pandangan yang luas dalam bahasanbahasan yang sangat umum.⁴⁸

47 Wursanto. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 56

48 Kenneth N. Wexley dan Gary A. Yuki, Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalialia, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005), hal.40

Pendekatan dasar yang disukai masing-masing teoritisi tersebut adalah untuk mencapai efisiensi intern organisasi dengan membagi tugas-tugas kedalam peran-peran spesialis, melengkapi dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang terinci, serta menetapkan suatu hirarki kekuasaan dengan pengawasan yang sangat ketat untuk menjamin agar peraturan-peraturan dan prosedur dipatuhi. Sedangkan serangkaian prinsip-prinsip pengorganisasian yang mencerminkan pokok-pokok pandangan umum para teoritisi klasik meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

1. Pembagian kerja. Keseluruhan tugas/pekerjaan dibagi-bagi kedalam fungsi-fungsi spesialis dan setiap bagian dari fungsi ini ditugaskan pada orang-orang yang memiliki kecakapan yang diperlukan.
2. Penetapan Tugas-tugas, Peraturan dan Tanggung Jawab dengan jelas. Setiap orang dalam organisasi seharusnya memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas. Pada jenjang-jenjang yang lebih bawah, pekerjaan seharusnya disederhanakan dan suatu prosedur yang “terbaik” untuk pelaksana setiap pekerjaan seharusnya ditetapkan dan terutama untuk para pekerja.
3. Kesatuan Komando. Seharunya terdapat suatu mata rantai komando yang jelas dari puncak sampai ke bawah dalam hirarki kekuasaan. Seharusnya tidak ada orang yang menerima perintah lebih dari seorang pimpinan dan seharusnya tidak terdapat tumpang tindih (overlapping) kekuasaan pada jenjang yang sama.

49 Ibid, hal.40-41

4. Kesatuan Arah. Pekerjaan-pekerjaan seharusnya dikelompokkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan terarah pada tujuan yang sama, berdasarkan rencana yang sama dan diarahkan oleh seorang manajer.
5. Rentang Pengendalian Yang Sempit. Setiap manajer seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi hanya jumlah yang sedikit dari bawahannya untuk menjamin pengendalian dan koordinasi yang efektif terhadap aktivitas para bawahannya.
6. Perimbangan Kekuasaan dan tanggung Jawab. Kekuasaan yang didelegasikan kepada setiap manajer seharusnya memudahhi untuk melaksanakan tugasnya.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, berada pada posisi astronomi antara $02^{\circ} 15' 03''$ - $02^{\circ} 55' 04''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 40' 15''$ - $96^{\circ} 30' 45''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah meliputi :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Simeulue;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Simeulue;
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terdapat sekitar 147 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. Panjang Pulau Simeulue 100,2 Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km.⁵⁰

50 Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Ii-2

Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil disekitarnya adalah 212.512 Ha, sedangkan berdasarkan digitasi Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah Simeulue adalah 183.809 Ha. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 60 pulau besar dan kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838,09 Km² atau 183,809.Ha. Kepulauan ini dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan Internasional.⁵¹ Kabupaten Simeulue secara administrasi pemerintahan terbagi atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, dengan Sinabang sebagai Ibu kota Kabupatennya. (Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2012).

3.2. Demografi

Gambaran Demografis Kabupaten Simeulue pada tahun 2013 terlihat pada laju pertumbuhan penduduk Simeulue tahun 2013 adalah 0.49%. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk di Kabupaten Simeulue tahun 2013 berjumlah 83.173 jiwa terdiri dari 42.596 jiwa laki-laki dan 40.577 jiwa perempuan sedangkan pada tahun 2012 jumlah penduduk Simeulue sebanyak 82.762 jiwa. Ditinjau dari distribusinya jumlah penduduk kondisi sebarannya tidak berbeda dengan tahun sebelumnya dimana kecamatan Simeulue timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 30.536 jiwa atau 36.71% dari total penduduk di Kabupaten Simeulue. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di

51 *Ibid*,

kecamatan Alafan jiwa atau sebesar 5.37% dari total penduduk. Di Kabupaten Simeulue kepadatan penduduk sebesar 45 jiwa/Km².

3.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.3.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Periode tahun 2009 hingga tahun 2012, dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Simeulue, kontribusi sektor primer memperlihatkan penurunan sedangkan sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan. Sebagaimana daerah agraris pada umumnya, sektor pertanian masih menjadi motor yang menggerakkan peningkatan PDRB Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2009 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 41,61 persen terhadap total PDRB namun secara bertahap menurun setiap tahunnya sehingga pada tahun 2012 menjadi 36,17 persen. Sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Simeulue tahun 2012 setelah sektor Pertanian. Sepanjang kurun waktu 2009 hingga 2012, peranan sektor ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, peranan sektor ini sebesar 17,20 persen dan naik hingga menjadi 20,38 persen pada tahun 2012.

Sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar ketiga adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan persentase 17,15 persen. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran secara konsisten menduduki peringkat ketiga dalam kontribusi terhadap total PDRB selama empat tahun terakhir di bawah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 17,12 persen. Setelah itu terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2012 menjadi 17,15 persen. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu

tahun 2009 sampai 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue selalu positif namun dengan kecepatan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 5,19 persen.

Setahun kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue meningkat menjadi 6,94 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 4,86 persen dan terakhir tahun 2012 naik menjadi 5,44 persen. Kesembilan sektor ekonomi di Kabupaten Simeulue selalu mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2012. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 adalah sektor Listrik, Gas & Air Bersih yaitu mencapai 11,80 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mencapai angka 9,15 persen, kemudian diikuti oleh sektor Bangunan yaitu sebesar 8,77 persen.⁵²

3.3.2 Persentase Penduduk miskin

Persentase penduduk miskin yang diperhitungkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Kabupaten Simeulue selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2010 dengan garis kemiskinan 278.023 rupiah terdapat 23.63% dari populasi di Kabupaten Simeulue yang tergolong penduduk miskin. Tahun 2011 persentase penduduk miskin 22.96% dari populasi dengan batas kemiskinan 300.467 rupiah. Untuk tahun 2012 persentasenya terus berkurang menjadi 21.88% dari populasi yang ada dengan menggunakan garis kemiskinan 324.723 rupiah.⁵³

52 Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue

53 *Ibid*,

3.3.3 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf Dan Partisipasi Sekolah

Menurut Statistik Daerah Kabupaten Simeulue 2013 pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun keatas di Kabupaten Simeulue tahun 2011 sebagian besar SD/ sederajat yang mencapai 33,71%. Sedangkan yang SMP/ sederajat sebanyak 21.90 %. Adapun yang tidak/ belum tamat SD sebanyak 17.91%. Sedangkan penduduk yang tamat SMA sederajat sebesar 19.93%, meningkat selama 3 tahun terakhir. Tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah pada tahun 2012 juga tinggi yang diperlihatkan melalui angka partisipasi sekolah (APS) untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun sebanyak 98,52 persen diantaranya aktif belajar di sekolah. APS untuk usia 13-15 tahun sebanyak 96,62 persen dan untuk usia 16-18 persen sebanyak 78,99 persen. Dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan, pada jenjang pendidikan SD/ sederajat di Kabupaten Simeulue seorang guru rata-rata mengajar 8 murid. Pada jenjang SMP/ sederajat seorang guru mengajar 8 murid. Dan pada jenjang SMA/ sederajat beban seorang guru mengajar 9 murid. Dengan beban mengajar lebih sedikit akan membuat kegiatan belajar mengajar lebih efektif.⁵⁴

2. Angka Partisipasi Sekolah

Tahun 2012, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah mengalami kenaikan dibanding tahun 2011. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Simeulue untuk usia 10 tahun ke atas telah mampu membaca dan menulis. Tahun 2012 Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok

54 *Ibid*,

usia 7-12 tahun mencapai 99,52%, dibanding tahun 2011 sebesar 98,88%, kelompok usia 13-15 tahun mencapai 96,62% dibanding tahun 2011 sebesar 94,83%, dan kelompok usia 16-18 tahun mencapai 78,99% dibanding tahun 2011 sebesar 78,81%. Ketersediaan fasilitas pendidikan termasuk faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di perkotaan dan perdesaan telah memiliki kesempatan yang relatif sama dalam mengakses pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar.⁵⁵

3. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Secara umum sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Simeulue memiliki daya tampung yang cukup. Di Kabupaten Simeulue terdapat 127 unit sekolah tingkat dasar, yang terdiri dari 114 SD dan 13 MI. Jika dilihat dari jumlah desa sebanyak 138 desa, maka perbandingan antara sekolah dan desa adalah 1:1, artinya di setiap 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) unit sekolah dasar (SD/MI). Dari segi proporsi terlihat bahwa jumlah SD lebih besar dari jumlah MI, dengan komposisi masing-masing adalah 90% dan 10%.

Salah satu kebijakan pokok dalam Renstra Pendidikan Nasional adalah memberi kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang diwujudkan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun. Hal ini dimungkinkan dengan adanya penyebaran lembaga pendidikan dasar dan juga tenaga pengajar hingga ke desa-desa terpencil. Adapun kondisi saat ini, sebaran lembaga pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), di Kabupaten Simeulue sebanyak 43 unit, baik yang

55 *Ibid*,

berstatus negeri maupun swasta. Bila dibandingkan dengan jumlah desa yang jumlahnya 138 desa, maka rasio desa dan sekolah (SMP/MTs) adalah 4:1, yang artinya di setiap 4 desa terdapat 1 (satu) sekolah. angka ini sudah menunjukkan pemerataan lembaga pendidikan, karena penyebarannya sudah sampai ke desa-desa terpencil. Jumlah ini sedikitnya mempengaruhi capaian APM penduduk, dimana APM penduduk usia 13-15 tahun pada tingkat SMP/MTs tahun 2012 mencapai 72,39%. Selanjutnya APM penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang SMA/MA/SMK termasuk Paket C di Kabupaten Simeulue mencapai 69,43%.⁵⁶



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Mekanisme Penempatan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue

Indonesia mengalami masalah dalam menjalankan proses pemerataan dan penataan jumlah guru yang masih belum seimbang, khususnya antara jumlah guru yang berada di daerah kota dengan guru di daerah desa, bahkan di daerah yang sangat terpencil. Ironisnya, di desa atau di daerah yang terpencil masih banyak sekolah yang mengalami masalah kekurangan guru. Terkadang satu guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Padahal hal itu tidak diperbolehkan karena menyangkut tentang profesionalitasnya sebagai guru. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah di kota, lebih dari 50% sekolah kota justru kelebihan guru. Tidak bisa disangkal bahwa guru umumnya tidak akan mau mengajar di tempat yang sangat terpencil, hanya sebagian orang guru yang benar benar memiliki tujuan atau ingin mengabdikan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Namun itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan jumlah guru.

Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, Aceh juga memiliki berbagai masalah menyangkut penempatan dan pemerataan guru. Salah satu Kabupaten di Aceh yang masih mengalami permasalahan besar dalam penempatan dan pemerataan guru yang berkeadilan yaitu Kabupaten Simeulue. Sesuai tema pembangunan tahun 2016 dalam Dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue yaitu “Pemantapan infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan”, prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue diarahkan pada penggunaan sumber daya dan implementasi setiap kebijakan pembangunan dengan tujuan utamanya adalah tercapainya prioritas pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Simeulue, salah satu diantaranya adalah peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.⁵⁷Namun, pada kenyataannya pendidikan di Kabupaten Simeulue masih sulit untuk ditingkatkan kualitasnya karena masih mengalami permasalahan penempatan dan pemerataan guru, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Simeulue memiliki SMP sebanyak 45 unit dengan jumlah murid sebanyak 4616 yang tersebar 10 kecamatan. Guru yang tersedia di tahun 2020 yaitu sebanyak 227 guru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁵⁸

Tabel 4.1
Jumlah Ketersediaan, Kebutuhan, dan Kekurangan Guru padatingkat SMP di Kabupaten Simeulue.

No	Guru Mata Pelajaran	Ketersediaan Guru	Kebutuhan Guru	Kekurangan Guru
1	Guru PAI/BP	27	46	19
2	Guru PKN	14	46	32
3	Guru Bahasa Indonesia	32	60	28
4	Guru Matematika	23	49	26
5	Guru IPA	41	50	9
6	Guru IPS	45	51	6
7	Guru Bahasa Inggris	17	48	31
8	Guru Seni Budaya	4	46	42
9	Guru PJOK	15	46	31
10	Guru Prakarya	6	45	39
11	Guru BK	3	45	42
JUMLAH TOTAL		227	532	305

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun, 2020.

57 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2017

58 Data diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa memang terjadi kekurangan guru di Kabupaten Simeulue pada hampir semua mata pelajaran. Terutama pada mata pelajaran Bimbingan Konseling, Seni Budaya, Prakarya dan PJOK. Sedikit sekali guru mata pelajaran tersebut yang tersedia di Kabupaten Simeulue. Oleh karenanya, kekurangan guru mata pelajaran tersebut memang terjadi hampir di seluruh SMP di Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat kekurangan guru di hampir semua SMP di Kabupaten Simeulue. Terutama pada SMP yang terletak di pedesaan yaitu SMPN 1 Alafan yang merupakan SMP Negeri dengan jumlah kekurangan guru terbanyak. Sangat berbeda dengan SMPN 2 Simeulue Timur yang terletak di Ibukota Kabupaten Simeulue (Sinabang). Selain itu, peneliti juga membandingkan dengan SMPN 1 Teupah Tengah yang lokasinya berada di tengah-tengah. Data yang peneliti dapat tersebut, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Guru ASN pada beberapa SMP di Kabupaten Simeulue

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru ASN
1	SMPN 2 Simeulue Timur	19 (sembilan belas) orang
2	SMPN 1 Teupah Tengah	9 (Sembilan) orang
3	SMPN 1 Alafan	4 (empat) orang

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2019.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan serta ketidakmerataan penempatan guru ini adalah karena letak geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan sebuah pulau dan agak sulit dijangkau, Kabupaten Simeulue juga merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).

Daerah tertinggal didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana penduduknya). Penentuan wilayah tertinggal menggunakan kriteria berdasarkan 6 pendekatan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah.⁵⁹

Selain itu, kurangnya formasi penempatan guru oleh pemerintah pusat, bahkan pada tahun 2019 tidak ada sama sekali formasi penerimaan guru di Kabupaten Simeulue. Masalah lainnya adalah, terjadinya kelebihan guru pada beberapa bidang studi saja, sementara pada bidang studi lain terjadi krisis guru, bahkan tidak tersedia satu orang pun guru mata pelajaran tersebut, diantaranya yaitu guru seni budaya, guru prakarya dan bimbingan konseling. Akibatnya, guru-guru terpaksa mengajar lebih dari satu bidang studi dan mengajar yang bukan dibidangnya, karena keterbatasan guru yang dibutuhkan. Berikut peneliti tampilkan data yang telah peneliti peroleh dari dinas pendidikan Kabupaten Simeulue yang menunjukkan persoalan kekurangan guru pada beberapa mata pelajaran di ketiga SMP Negeri yang telah diteliti:

59 Handoko Arwi Hashtoro dan Nanik Ambarwati, Analisis Sebaran Guru Dikdasmendi Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal): Tinjauan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 14

Tabel 4.3
Jumlah Guru Mapel SMP Negeri di Kabupaten Simeulue

No	Nama Sekolah	PAI&BP	PKN	B.IND	MTK	IPA	IPS	B.ENG	SBD	PJOK	PRKRY
1	SMP 2 Simeulue Timur	2	1	3	1	4	2	3	0	1	0
2	SMPN 1 Teupah Tengah	1	1	1	0	2	1	0	1	1	0
3	SMPN 1 Alafan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

Keterangan:

PAI&BP : Pendidikan Agama Islam&Bimbingan Pendidikan
 PKN : Pendidikan Kewarganegaraan
 B.IN : Bahasa Indonesia
 MT : Matematika
 IPA : Ilmu Pengetahuan Alam
 IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial
 B.EN : Bahasa Inggris
 SBD : Seni Budaya
 PJOK : Pendidikan Jasmani dan Olahraga
 PRKRY : Prakarya

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan antara ketersediaan guru pada SMP Negeri yang terletak di perkotaan dan SMP Negeri yang terdapat di pedesaan. Ketersediaan guru pada SMP Negeri dipedesaan umumnya masih rendah, yakni SMPN 1 Alafan yang hanya terdapat sebanyak 4 (Empat) orang guru ASN, dimana samasekali tidak tersedia guru mata pelajaran IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK dan Prakarya. Berbeda dengan SMPN 1 Teupah Tengah, dimana terdapat 9 (Sembilan) guru mata pelajaran, yang tidak tersedia hanya di mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Prakarya.Sementara itu, di SMPN 2 Simeulue Timur, terdapat sebanyak 13 guru dengan kuota hampir semua mata pelajaran tersedia, hanya pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya yang belum tersedia.Data tersebut

menunjukkan kesenjangan jumlah guru antara sekolah dipedesaan dan diperkotaan.

Kesenjangan penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue, dijelaskan pula berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue:

“Faktor penghambat penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue yang pertama sekali karena faktor geografis kita. Kemudian yang kedua, guru yang diangkat sebelumnya itu bertumpuk pada satu bidang studi tertentu. Katakanlah misalnya bidang studi agama, sudah banyak. Tetapi di bidang studi yang lain terjadi kekosongan. Itu jadi penyebab jika dilihat secara rasio. Kemudian di Simeulue ini jumlah murid kita tidak terlalu banyak karena tersebar di daerah kepulauan, di daerah-daerah yang tidak terjangkau jalan, jadi disitu yang mungkin terhalang sedikit masalah rasio. Kalau di Kabupaten Simeulue, kekurangan jumlah guru terjadi itu karena kurangnya Formasi penerimaan guru, di tahun 2019 saja itu tidak ada formasi. Sementara faktor penghambat dalam mekanisme penempatan dan pemerataan guru di tingkat pendidikan dasar terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang pertama adalah faktor geografis, kemudian faktor jalan yang belum 100 persen bagus, namun program bupati kita pada hari ini sedang melakukan jalan lingkaran, Alhamdulillah sudah berjalan program tahun 2021 akhir ini, program ini sudah tuntas. Kemudian ketersediaan alat transportasi yang masih sangat terbatas, sehingga banyak sekali pertimbangan dari sebagian guru-guru yang ingin mengajar disini”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 1 Teupah Tengah, beliau mengungkapkan bahwa disekolahnya juga mengalami permasalahan guru, yakni:

“Sangat kurang guru disekolah ini, yaitu guru matematika, bahasa inggris, kemudian IPA, IPS juga, bahasa Indonesia, hampir seluruh mata pelajaran terjadi kekurangan guru.”⁶¹

60 *Ibid,*

61 Wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 1 Teupah Tengah, Ermi Sarina Dewi, S. Pd

Hal yang sama juga terdapat di SMPN 2 Simeulue Timur. Pernyataan ini dibuktikan dari ungkapan salah satu Guru SMPN 2 Simeulue Timur, yakni:

“Kebetulan kalau untuk di SMPN 2 Simeulue Timur, itu cuma beberapa guru saja yang kurang yaitu guru prakarya dan bimbingan konseling. Mungkin rata-rata sekolah di Simeulue ini memang tidak memiliki guru prakarya. Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan pelajaran prakarya tersebut maka diisi oleh guru-guru yang notabene nya hampir mendekati ilmu yang dia miliki. Seperti mungkin diisi dengan guru IPA.”⁶²

Selain itu kekurangan guru juga terjadi di SMPN 1 Alafan, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPN 1 Alafan:

“Memang masih ada beberapa guru yang tidak ada, kalau kita lihat dari status PNS sekolah ini, yang pertama guru Penjaskes, guru kesenian, kemudian guru PKN dan termasuk guru Bimpen (BK) yang tidak tersedia.”⁶³

Salah satu guru di SMPN 1 Alafan juga menyatakan bahwa:

“Iya, ada beberapa mata pelajaran yang kekurangan guru, yang memang guru tetapnya tidak ada. Ada 4 mata pelajaran yang tidak tersedia guru, yang pertama mata pelajaran seni budaya, kemudian penjaskes, PPKN, dan prakarya, jadi 4 mata pelajaran itu memang tidak ada gurunya sama sekali, sehingga perlu guru dari sekolah lain untuk mengisi mata pelajaran tersebut di sekolah kita. Yakni guru yang memang sertifikasi yang mencari jam tambahan untuk mengajar. Bukan guru tetap.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di beberapa sekolah SMP Negeri di Kabupaten Simeulue, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar sekolah-sekolah SMP di Kabupaten Simeulue memang mengalami kekurangan guru. Peneliti melakukan penelitian di beberapa SMP, baik SMP yang terdapat di perkotaan maupun SMP di pedesaan. Meskipun pada kenyataannya, jumlah kekurangan guru lebih didominasi oleh sekolah-sekolah

62 Wawancara dengan Citra Dewi Maysarah, Guru SMPN 2 Simeulue Timur

63 Wawancara dengan Zulfian M. Pd, kepala sekolah SMPN 1 Alafan

64 Wawancara dengan Hadjatun Chaira, guru SMPN 1 Alafan

yang berada di desa yaitu SMPN Alafan sebagai salah satu SMP Negeri yang diteliti.

Sementara untuk rasio, jumlah guru yang tersedia sudah hampir sesuai, hanya saja distribusi, penempatan dan pemerataannya saja yang kurang optimal dan kurangnya guru dalam beberapa mata pelajaran tertentu yang memang tidak tersedia di Kabupaten Simeulue. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue:

“Sebenarnya kalau berdasarkan rasio, sudah hampir sesuai. Tetapi sekarang ini bidang studi yang diajarkan itu terkadang masih satu guru bertumpuk-tumpuk mengajar satu bidang studi. Sedangkan dibidang studi yang lainnya tidak terpenuhi. Jadi belum memenuhi standar rasionya.”⁶⁵

Karena banyaknya kekurangan guru terjadi di sekolah yang berada di desa, sehingga tidak jarang kita melihat banyak terjadinya ketimpangan antara sekolah-sekolah di desa dengan sekolah di kota yang akreditasinya sangat baik. Karena guru merupakan salah satu penentu bagus tidaknya akreditasi sekolah.

“Akreditasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan guru. Karena salah satu unsur penentu akreditasi adalah guru. Bila guru kurang tentu akreditasi akan menurun, tapi rata-rata akreditasi sekolah kita di simeulue sudah mencapai A dan B, walaupun masih banyak sekolah-sekolah yang masih berakreditasi C. namun tetap upaya kita, mereka yang sudah memiliki akreditasi A kita coba pertahankan, yang mereka C kita dongkrak dengan melengkapi berbagai sarana dan prasarana disekolahnya terutama masalah ketenagaan dan ketersediaan guru.”⁶⁶

Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan mengenai penempatan dan pemerataan guru adalah:

65 Wawancara dengan Dinul Fahmi S. Pd, Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue,

66 *Ibid*,

1. Faktor Sumber Daya Manusia yang masih sangat kurang. Artinya, memang tidak terdapat guru dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, seperti guru seni budaya dan prakarya.
2. Faktor Infrastruktur. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
3. Faktor kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal.
4. Faktor proses pembelajaran yang masih konvensional. Saat ini kebanyakan sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada.
5. Lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional
6. Keterbatasan anggaran yang dimiliki
7. Pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah.

Dalam proses pelaksanaan penyediaan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, dinas pendidikan Kabupaten Simeulue sendiri mengacu kepada beberapa dasar hukum yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, yakni:

“Ada beberapa dasar hukum yang kita gunakan, yang pertama sekali kita gunakan adalah Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Beban Kerja, kemudian yang kedua PP no 19 tahun 2017 atas perubahan pada PP no 74 tahun 2008 tentang pemerataan guru. Kemudian juga ada perka (peraturan kabupaten) nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara mutasi guru. kemudian ada peraturan bersama antara mendikbud, kemudian kemendagri dan kemenag tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru.”⁶⁷

67 Wawancara dengan Dinul Fahmi S. Pd, Kabid GTK di Dinas Kabupaten Simeulue

Jadi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab terhadap terlaksananya pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Simeulue, Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue tetap mengacu kepada dasar hukum yang tersedia. Untuk melihat bagaimana mekanisme penempatan guru di Kabupaten Simeulue, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa mekanisme penempatan guru tersebut kepada konsep dari GTK (Guru Tenaga Kependidikan) yaitu tentang pemerataan guru. Kemudian bersama-sama mencoba mencari solusi bagaimana pendidikan berkeadilan.”⁶⁸

Selain itu, menurut Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan, (Kabid GTK) sendiri, mekanisme penempatan guru di Kabupaten Simeulue pada umumnya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih ada hal-hal yang menjadi penghambat. pertama, karena ada beberapa guru yang ditugaskan oleh pemerintah pusat rata-rata mereka pindah dibawah sepuluh tahun dengan berbagai kepentingan mereka harus pindah kembali ketempatnya, kemudian yang kedua ada beberapa faktor, misalnya kalau pegawai yang perempuan kalau suami bertugas dikota maka dari desa dia ikut ke kota (faktor keluarga) maka terjadilah kekurangan guru di desa tersebut, walaupun sudah ada perjanjian dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan yang dimaksud dalam PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru.⁶⁹

68 *Ibid,*

69 Wawancara dengan Kabid GTK, Dinul Fahmi, S.Pd

Untuk melihat mekanisme penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue, maka dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni pada pasal 59 bahwa:⁷⁰

1. Guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah khusus paling singkat selama sepuluh (10) tahun;
2. Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti;
3. Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Jika melihat implementasi dari pasal 59 PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue. Hal ini dapat dilihat dari poin-poin pada pasal 59 PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa:

1. Guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah khusus paling singkat selama sepuluh (10) tahun. Prosedur ini sudah dijalankan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid GTK di Dinas Pendidikan Simeulue:

“Sebenarnya sebahagian sudah dijalankan, tetapi pada bahagian yang lainnya juga masih ada yang belum terpenuhi karena penambahan guru

70 Pasal 59 PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru

kita hampir sangat sedikit, terutama sekali di tahun 2019 kita tidak mendapatkan formasi, Jadi mau tidak mau, kita hanya menggunakan guru yang ada di Kabupaten Simeulue dengan ditambah dengan pegawai-pegawai kontrak yang diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota”. Kalau yang terhitung 2015 itu pegawainya wajib menandatangani surat kesanggupan bekerja minimal 10 tahun. Jadi itu sudah terpenuhi. Jadi memang kita sudah mengikuti sesuai dengan prosedur, hanya saja ada beberapa hal yang diluar kewenangan kami, mungkin ada satu-dua karena faktor lain, tapi pada dasarnya, itu sudah terlaksanakan.”⁷¹

Selain itu, pelaksanaan peraturan ini juga dialami langsung oleh beberapa guru dan kepala sekolah yang mengajar di beberapa SMP Negeri di Kabupaten Simeulue. Mereka sebagai objek dari adanya peraturan ini dan mengalami sendiri dalam hal bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan bersedia ditempatkan di Kabupaten Simeulue minimal selama 10 tahun sebelum mengajukan permohonan pindah dengan syarat harus terdapat guru penggantinya dahulu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Teupah Tengah:

“Sebenarnya ketika guru sudah tes PNS di daerah kita, semuanya sudah dilaksanakan untuk menandatangani surat kesanggupan tersebut, hanya saja dalam pelaksanaannya barangkali ada beberapa hal pertimbangan-pertimbangan, sehingga ada juga beberapa guru yang belum sepuluh tahun sudah dipindahkan, mungkin karena faktor keluarga dan lain-lain juga.”⁷²

Selain itu, hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan salah satu Guru di SMPN 1 Alafan:

“Ya sepengetahuan saya, kalau itu ada juga yang terlaksana, tetapi ada juga beberapa orang yang tidak. Saya jujur saja tidak tau apa alasan yang urgent nya, ada beberapa orang guru memang, yang baru diangkat belum sampai 5 tahun mereka sudah pindah ke daratan sana. Bahkan ada

71 Wawancara dengan Dinul Fahmi S. Pd, Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

72 Wawancara dengan Ermi Sarina Dewi, S. Pd, Kepala sekolah SMPN 1 Teupah Tengah

guru kita beberapa orang yang pindah, memang itu tidak semua, ada beberapa yang masih disini. Tetapi yang sayaliat dan saya dengar itu duah ada yang pindah, yang seharusnya mereka harus berpegang teguh pada pakta integritas itu.”⁷³

Begitu pula dengan pernyataan salah satu Guru SMPN 2 Simeulue Timur:

“Ya, saya rasa ini sudah benar-benar dilaksanakan. Karena saya sendiri juga termasuk kedalam aturan tersebut dimana ketika kami CPNS itu, sebelum diberikan SK kami harus melengkapi surat pernyataan tersebut. Tanda tangan diatas materai, berjanji bahwa tidak akan pindah selama maksimal 10 tahun dimanapun ditempatkan”⁷⁴

2. Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak mengalami hambatan. Kebanyakan guru-guru yang mengajar disana, kemudian mengajukan permohonan pindah dengan alasan-alasan tertentu, belum tersedia guru pengganti yang bisa menggantikannya, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue:

“Hal ini belum terlaksana secara optimal, karena program tahun 2018 ada disebut dengan program Jarti. Tapi hanya berlangsung selama satu tahun, ditahun berikutnya apabila terjadi kekosongan guru apakah dia mengikuti sertifikasi, keluar dari kabupaten Simeulue untuk 2019-2020 kita tidak mendapatkan guru pengganti, tetapi juga mengupayakan secara optimal guru-guru yang ada, katakanlah tadi pemerintah daerah mengangkat guru-guru kontrak baru kemudian juga memberikan SK kepada guru-guru bakti untuk menutup kekurangan.”⁷⁵

73 Wawancara dengan Hadjatun Chaira, salah satu Guru SMPN 1 Alafan

74 Wawancara dengan Citra Dewi Maysarah, Guru SMPN 2 Simeulue Timur

75 Wawancara dengan Dinul Fahmi S. Pd, Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

Begitu pula pernyataan Kepala Sekolah SMPN 1 Alafan yang menjelaskan

bahwa:

“Ini yang sulit ya, kalau ini agak sulit karena kadang-kadang begitu dia minta pindah, penggantinya yang susah. Sementara dia sudah punya hak, dan dengan berbagai pertimbangan itu diberikan kelonggaran atau dispensasi dari pemerintah daerah. Tapi begitu kita mencari guru penggantinya itu susah, karena mungkin yang pindah itu guru mapel biologi ada guru yang dobel disekolah lain itu mungkin guru PKN, ini memang susah sekali kalau yang satu ini.”⁷⁶

Selain itu, salah satu guru SMPN 2 Simeulue Timur juga memaparkan

bahwa:

“Nah kalau yang itu, saya juga masih belum banyak tau ya. Karena juga notabene nya saya masih terhitung satu tahun. Tapi mungkin kalau yang saya lihat-lihat sudah seperti itu, karena memang seluruh sekolah, kepala sekolah dan guru-gurunya paham dengan itu semua dan pasti aturan itu sudah dijalankan dengan sangat baik.”⁷⁷

3. Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal ini, banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid.GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue:

“Dilaksanakan secara optimal, mungkin belum. Akan tetapi sudah dilaksanakan. kemarin ada program Jarti (mengajar pengganti) itu program kita bersama pemerintah pusat. Kemudian ada rekrutmen tenaga honor daerah, kemudian guru bantu, kemudian ada juga kemarin kontrak baru, itu adalah upaya untuk menutupi kekurangan guru atau guru pengganti yang memang tidak ada guru disitu kita ganti dengan guru kontrak dan juga Jarti, jadi programnya itu.”⁷⁸

76 Wawancara dengan Zulfian M. Pd Kepala Sekolah SMPN 1 Alafan

77 Wawancara dengan Citra Dewi Maysarah, salah satu Guru SMPN 2 Simeulue Timur

78 *Ibid*,

Begitu pula dengan pernyataan salah satu guru di SMPN 1 Teupah Tengah yang mengatakan bahwa belum ada guru pengganti sejak kepindahan beberapa guru sebelumnya:

“Yang saya tahu, mereka pindah belum ada penggantinya. Ada beberapa orang yang saya tau. Tidak tahu juga ditempat lain bagaimana, tetapi di sekolah kita ada 2 orang yang pindah, yaitu guru seni budaya dan bimbingan konseling sampai saat ini belum ada penggantinya. Sampai saat ini belum ada penggantinya”⁷⁹

Hambatan dalam pelaksanaan prosedur tersebut juga dijelaskan oleh Citra Dewi Maysarah, selaku salah satu Guru SMPN 2 Simeulue Timur:

“Mungkin kalau yang itu, ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Karena mengingat itu tadi, namanya kita dipulau, masih tergolong wilayah yang jauh dari daratan Aceh kan, SDM juga masih sangat kurang. Ya memang ada beberapa sekolah yang sudah terpenuhi, namun ada juga ternyata beberapa sekolah yang masih belum terpenuhi, karena itu tadi mungkin faktor SDM yang kurang. Sementara pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkan guru-guru yang memang dibutuhkan disekolah tersebut. tapi mungkin itu hanya salah satu dari sekian banyak faktor ya.”⁸⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue dengan mengacu kepada pasal 59 PP No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun Kabupaten Simeulue merupakan zona 3T yang disebabkan karena letak geografisnya yang berada di pulau, seharusnya pemerintah lebih tegas untuk menempatkan guru PNS di daerah-daerah terpencil, agar jumlah guru di daerah terpencil tidak kekurangan,

79 Wawancara dengan salah satu guru di SMPN 1 Teupah Tengah Ardiansyah S. Pd

80 Wawancara dengan Citra Dewi Maysarah, salah satu Guru SMPN 2 Simeulue Timur

sedangkan jumlah guru di kota besar kelebihan. Pemerintah harus melakukan kebijakan agar penempatan guru merata di seluruh Indonesia. Meskipun sebenarnya masalah ini sangat sulit untuk diselesaikan. Untuk itu, upaya-upaya yang telah dan seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

4.2 Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Dalam Mengatasi Permasalahan Penempatan dan Pemerataan Guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue.

Tujuan Utama Penataan dan Pemerataan adalah untuk mengatur kembali kebutuhan guru pada satuan pendidikan agar rasional guna menciptakan pendidikan yang merata dan seimbang, proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga pada tujuan akhirnya ada kesamaan standar hasil pendidikan diseluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya standar kelulusannya, tapi yang jelas standar keilmuannya yang mendekati sama. Agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka tinjauan analisis kebutuhan tenaga pendidik harus benar-benar akurat dan realistis di lapangan. Oleh karena pendidikan dijalankan melalui gerakan otonomi daerah atau desentralisasi, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah kebutuhan guru oleh setiap satuan pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki kedudukan yang strategis, keberadaan guru merupakan salah satu kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang lebih baik dan profesional. Menurut Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik

pada tingkat anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.⁸¹

Proses penempatan guru yang tidak terarah, tidak adil dan tidak proporsional akan berpengaruh negatif terhadap guru dalam mengembangkan kemampuan dan pengabdian profesional kependidikannya. Selain itu juga menyurutkan niat generasi muda untuk memasuki profesi keguruan. Kenyataan yang dihadapi banyak guru yang berada di daerah terpencil tidak memiliki masa depan, baik bagi pengembangan karirnya maupun kesehatan rohani dan jasmaninya. Dihilangkannya program rotasi semakin menjadikan ciut semangat guru untuk meningkatkan profesionalismenya.

Rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik semakin tidak seimbang. Adanya sekolah yang kelebihan guru, namun di sisi lain masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru ini terpaksa mengangkat guru honorer/guru tidak tetap (GTT) yang gajinya jauh dibawah upah minimum. Lebih celakanya jenis guru yang satu ini tidak mempunyai ikatan perjanjian hukum yang jelas sehingga sewaktu-waktu dapat diberhentikan karena ada droping guru negeri baru.⁸²

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan kurangnya guru di Kabupaten Simeulue. Seperti yang dipaparkan oleh Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue:

81 Peraturan bersama lima menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS

82 Suryadi. 2005. Analisis Kebutuhan Guru Untuk Mengantisipasi Dampak Pensiun Guru Yang Direkrut Selama Pelaksanaan Inpres Sd Dan Wajib Belajar 6 Tahun (Studi pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat). Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. III, Nomor 2 Oktober 2005

“Upaya-upaya yang kita lakukan yang pertama kita sudah membuat analisis jabatan, pemetaan, dimana sebaran guru, dimana yang kosong, dimana yang sudah terpenuhi, itu yang kita lakukan, kemudian langkah selanjutnya yang kosong sudah kita mutasi, kemarin ada beberapa orang yang kita usulkan untuk di mutasi dari tempat yang menumpuk ketempat yang terjadi kekosongan. Jadi itu yang sedang kami lakukan.”⁸³

Upaya dalam mengatasi terjadinya kekurangan guru ini juga telah dilaksanakan oleh sebagian besar sekolah-sekolah SMP yang memang mengalami permasalahan kekurangan guru, seperti pernyataan Kepala Sekolah SMPN 1 Teupah Tengah:

“Ya, untuk sementara ini kita upayakan dengan merekrut guru honor, karena kalau tidak, tidak ada yang bisa masuk dikelas-kelas itu, karena keterbatasan guru tersedia. Jadi yang sangat kurang itu, pertama sekali bahasa inggris, kemudian matematika, ipa, bahasa Indonesia, memang hampir semua kurang. Kemarin kami data sekitar 13 jumlah kekurangan guru. Kita berupaya untuk merekrut guru bakti murni untuk memenuhi jam-jam pelajaran itu.”⁸⁴

Begitu juga dengan SMPN 1 Alafan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Alafan:

“Yang pertama kita mencari guru yang sesuai dengan mapel nya dari sekolah lain, terutama guru sertifikasi biasanya mereka disekolah induk kekurangan jam, maka kita tarik kemari. Kemudian juga ada beberapa guru yang kita tarik untuk kita jadikan guru bakti yang kita berikan insentif nya dari dana BOS.”⁸⁵

Hal ini didukung pula dengan pernyataan Ardiansyah selaku guru SMPN 1 Alafan:

“Ya kita dari pihak sekolah, melalui kepala sekolah sudah mengusulkan ke dinas pendidikan untuk meminta tambahan guru yang memang tidak tersedia agar dialokasikan ke sekolah kita, namun selagi menunggu, kami juga mencari guru yang dapat mengajar keempat mata pelajaran tersebut

83 Wawancara dengan Dinul Fahmi S. Pd, Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue
 84 Wawancara dengan Ermi Sarina Dewi, S. Pd, Kepala Sekolah SMPN 1 Teupah Tengah
 85 Wawancara dengan Zulfian, M. Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Alafan

dari sekolah lain yang sudah tersedia, disamping mereka juga mencari jam tambahannya.”⁸⁶

Hal ini juga didukung dengan pernyataan salah satu guru yang mengajar di SMPN 2 Simeulue Timur:

“Upaya, kita memanfaatkan atau berkoordinasi dengan guru-guru yang kiranya paham dengan pelajaran yang akan digantikan, kemudian yang bidang ilmu guru tersebut juga tidak jauh dari mata pelajaran yang akan diajarkannya seperti kalau prakarya tadi kan, yang mengajar bisa guru IPA, kenapa guru IPA. Karena didalam prakarya itukan ada pelajaran tentang budidaya, kemudian bercocok tanam. Nah itukan tidak jauh berbeda dengan guru ipa. Dan sebenarnya guru seni juga bisa untuk mengajar prakarya tersebut.”⁸⁷

Upaya dinas pendidikan dan kepala sekolah serta guru dalam mengatasi permasalahan kurangnya guru ini, juga di dukung dan dibenarkan oleh siswa di salah satu sekolah SMP Negeri di Kabupaten Simeulue yang mengatakan bahwa terdapat kekurangan guru yaitu guru seni budaya dan prakarya, dan Kekurangan guru ini biasanya diatasi dengan guru pengganti yang sedang tidak ada jam mengajar.⁸⁸

Untuk mengoptimalkan berbagai upaya yang dilakukan dalam hal penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue, maka proses evaluasi perlu dilakukan. Proses evaluasi bertujuan agar penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue tetap sesuai dengan standar yang dibutuhkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Proses evaluasi juga dilakukan agar dapat diperbaiki hal-hal yang kurang tepat untuk kiranya dilaksanakan dan dipikirkan kembali strategi yang tepat dalam hal

86 Wawancara dengan Hadjatun Chaira, salah satu guru SMPN 1Alafan

87 Wawancara dengan Citra Dewi Maysarah, salah satu guru SMPN 2 Simeulue Timur

88 Wawancara dengan Miftahul Humuri, salah satu siswa SMPN 2 Simeulue Timur

penyelesaiannya. Dalam hal evaluasi, dinas pendidikan kabupaten Simeulue bekerjasama dengan pengawas dan mengunjungi sekolah-sekolah secara langsung untuk melihat realita yang terjadi dilapangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue yaitu:

”Jadi untuk mengevaluasi, pertama sekali kita bekerja sama dengan pengawas, kemudian juga kita sering berkunjung ke daerah-daerah ke SMP untuk melihat kinerja mereka baik secara langsung maupun melalui pengawas. kemudian dari situ kita coba buat data dan evaluasi daripada guru-guru kita. Kita juga mensosialisasikan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang kepegawaian baik berupa pelanggaran, yaitu pelanggaran berat, ringan ataupun sedang, tetap kita terapkan agar mereka bisa bekerja dengan disiplin.”⁸⁹

Tujuan akhir dari adanya evaluasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Simeulue dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan guru, sehingga pendidikan yang berkualitas sebagai tujuan dari pembangunan pun dapat terealisasi, seperti yang dipaparkan oleh Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue:

“Harapan saya bagi dinas pendidikan pertama sekali yaitu melaksanakan atau mewujudkan visi misi bupati yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, kita mencari ranking yang mungkin juga salah satu terbaik dari kabupaten lainnya di Aceh, pertama sekali yang menyangkut delapan standar SPM (Standar Pelayanan Minimum) kita diantaranya baik standar ketenagaan, kurikulum, kemudian juga yang menyangkut dengan kelulusan. alhamdulillah saat ini Kabupaten Simeulue dari segitu banyak lulusan kita sudah masuk dalam sepuluh besar provinsi aceh. Kemudian juga kita akan memperbaiki data-data kita ke data dapodik insyaallah tahun 2019, kita menjadi peringkat 4 dapodik terbaik di Indonesia, mewakili Aceh dan ini salah satu faktor yang sangat penting, karena data pokok pendidikan ini bila tidak baik atau tidak akurat maka dapat terjadi kerugian dari kabupaten/kota. Jadi itulah harapan-harapan kami.yang

89 Wawancara dengan Dinul Fahmi S.Pd, Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

sudah ada akan dipertahankan, kemudian kedepan ya tentu semoga bisa lebih maju lagi.”⁹⁰

Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue diantaranya:

1. Melakukan pemetaan terhadap jumlah sekolah dan jumlah guru yang tersedia, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat, melakukan pemetaan agar bisa membuka formasi untuk guru PNS dapat mengajar di daerah 3T, sementara pemerintah provinsi melakukan pemetaan untuk melihat daerah mana saja yang mengalami kekurangan guru, serta pemerintah kabupaten yang berkewajiban menempatkan guru-guru secara merata di setiap sekolah yang mengalami kekurangan guru.
2. Merekrut guru-guru kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan mensejahterakan mereka dengan layak.
3. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil, misalnya mendapatkan beasiswa untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan syarat ketentuan tertentu.
4. Tenaga Pendidik yang mengajar di daerah terpencil diberikan tunjangan biaya hidup setiap bulannya, namun jika sebelum waktunya tenaga pendidik sudah meninggalkan tugasnya, harus diberikan sanksi seperti mengembalikan biaya yang telah diberikan kepadanya

5. Memperbarui program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan), seperti program SM3T, Program Guru Garis Depan (GGD), Program Bina Kawasan, dan program satu atap.
6. Memperkuat Undang-Undang dan peraturan mengenai penempatan dan pemerataan guru serta memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar.
7. Bekerjasama dan ikut melibatkan semua pihak yang berhubungan, baik Lembaga Pemerintahan yang terkait, LSM maupun *Civil Society*.
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini tenaga pendidik (guru), karena guru yang berkualitas akan menghasilkan pendidikan dan anak-anak yang berkualitas pula. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan program-program yang berdaya guna bagi para pendidik.
9. Memperbaiki dan memperbarui Infrastruktur yang belum memadai. Karena sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
10. Memperbarui proses pembelajaran yang sampai saat ini masih konvensional. Saat ini kebanyakan sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada.
11. Memperkuat kemampuan sistem pendidikan nasional.

12. Memperbesar pos anggaran untuk pendidikan namun harus tetap memperhatikan kebutuhan sehingga dana yang dianggarkan dapat efektif dan efisien.
13. Menciptakan pendidikan yang berbasis pada masyarakat dan potensi daerah.

Kebijakan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan melalui penguatan program diantaranya: penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar 9 tahun; pembangunan unit Sekolah maupun ruang kelas baru laboratorium ataupun perpustakaan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar; rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun; pengembangan pendidikan kesetaraan pada anak usia sekolah melalui paket A, Paket B dan paket C; pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional guna menurunkan penduduk buta aksara.⁹¹

Pada akhirnya, tujuan utama dari perluasan penempatan dan pemerataan guru demi meningkatkan kualitas pendidikan adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai tujuan-tujuan luhur bangsa Indonesia,

91 Mahpudz, Kade, dan Haerudin, "Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu," h. 77.

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Maka, sudah sepatutnya bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Perlu ada kerjasama dan keterlibatan dari semua pihak yang berhubungan, baik Lembaga Pemerintahan yang terkait, LSM maupun *Civil Society*, dengan begitu maka pendidikan yang berkualitas pun akan terwujud di semua lini masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Mekanisme penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue jika dilihat berdasarkan pasal 59 PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Terjadi kesenjangan antara jumlah guru pada SMP Negeri dipedesaan dan diperkotaan, dimana jumlah kekurangan guru terbanyak terdapat pada sekolah-sekolah yang berada dipedesaan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena letak geografis Kabupaten Simeulue yang berada di daerah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan), faktor kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, faktor kurangnya formasi guru dari pemerintah pusat pada penerimaan ASN, dan lain-lain.
2. Adapun upaya pemerintah khususnya dinas pendidikan Kabupaten Simeulue dalam mengatasi permasalahan penempatan dan pemerataan guru ini diantaranya adalah: Melakukan pemetaan terhadap jumlah sekolah dan jumlah guru yang tersedia, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten; merekrut guru-guru kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan mensejahterakan mereka dengan layak; memberikan kemudahan-kemudahan bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil; memperbarui program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar

dan Terdepan); memperkuat Undang-Undang dan peraturan mengenai penempatan dan pemerataan guru serta memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar; Bekerjasama dan ikut melibatkan semua pihak yang berhubungan, baik lembaga pemerintahan yang terkait, LSM maupun *Civil Society*; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini tenaga pendidik (guru); memperbaiki dan memperbarui infrastruktur yang belum memadai serta memperbesar pos anggaran untuk pendidikan namun harus tetap memperhatikan kebutuhan sehingga dana yang dianggarkan dapat efektif dan efisien serta menciptakan pendidikan yang berbasis pada masyarakat dan potensi daerah.

2.1 SARAN

1. Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah agar pemerintah lebih memperhatikan kembali dan mengambil kebijakan yang tepat bagaimana seharusnya penempatan dan pemerataan guru yang berkeadilan. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam hal memajukan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Pemerataan akses pendidikan khususnya di daerah 3T merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Proses pemerataan pendidikan ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau Negara melainkan dengan kerjasama antar berbagai pihak, karena proses pemerataan akses pendidikan ini harus dilakukan secara oleh semua pihak yang ada di dalam bangsa Indonesia.
2. Peneliti menyarankan agar penelitian yang berhubungan dengan penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue dapat dilanjutkan oleh peneliti

lain sehingga penelitian ini dapat disempurnakan dan dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, M. Yatim. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman, M.Nazir, dkk. 2018. *Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Burhan, Bungin,. 2011.*Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hashtoro, Handoko Arwi dan Nanik Ambarwati. 2016. *Analisis Sebaran Guru Dikdasmendi Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal): Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wardan, Khusnul. 2019. *Guru Sebagai Profesi*. Deepublish: Yogyakarta, ISBN 978-623-209-539-7
- Mahpudz, Kade, dan Haerudin. 2001. *Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu*.
- MD,Mohammad Mahfud. 2001.*Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam pemerintahan yang bersih, cet.2*.Yogjakarta:Uii Press,
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustari, Muhammad .2013.*Manajemen Pendidikan dalam Konteks Indonesia*. Arsad Press: Bandung, ISSN 978-602-7917-23-1
- Narwawi, Hadari. 2007.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yokyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. h.29.

Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.

Sutupo, H. B. 2002. *Metedologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Ii-2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2017

Jurnal/Skripsi:

Abdullah, Muhammad (2018). *Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru PNS Pada Jenjang SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul*. Skripsi Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Arisaputra, Muhammad Ilham. Mei-Agustus 2013. e-Jurnal, Volume 28 No2, Diakses 16 Desember 2019.

Baharudin. Ujian Nasional dan Pembudayaan Siswa Aktif Belajar (Refleksi Pasca Putusan Permendikbud No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik UN). *Jurnal TERAMPIL, Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 p-ISSN 2355-1925. 2015

Dewi, Citra. (2018) *Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Indonesian Journal of Education and Learning* Volume 1 Nomor 2 April 2018. DOI: 10.31002/ijel.v1i2.649

M. Shabri Abd. Majid (2014) *Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh*. Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. *Jurnal Pencerahan* Volume 8, Nomor 1, Juli - Desember 2014. ISSN: 1693 – 7775

Putri Wahyu Febriani (2017) “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governace Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo”. (Skripsi yang dipublikasi), Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial. Hal ix. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Ratnasari, Desi Dkk (2018) “ Implementasi Pemerataan Guru PNS di Kota Batam (Studi Kasus Pada Jenjang Sekolah Dasar). Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Suryadi.(2005). Analisis Kebutuhan Guru Untuk Mengantisipasi Dampak Pensiun Guru Yang Direkrut Selama Pelaksanaan Inpres Sd Dan Wajib Belajar 6 Tahun (Studi pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat). Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. III, Nomor 2 Oktober 2005.

Wahono (2014). Kualitas Pembelajaran Siswa SMK Ditinjau Dari Fasilitas Belajar. Jurnal Ilmiah Guru “Cope”, No. 01/Tahun Xviii/Mei 2014

Artikel/Website Resmi Pemerintah:

Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi. Diakses di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2015---2017>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue 2020

Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue tahun 2019

Dian Isrowati. MSDM (Orientasi, Training, Development), diakses di <https://www.scribd.com/doc/243816048/Msdm-Orientasi-Traning-Development> pada 07 Maret 2020.

Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh (diakses di Bappeda.acehprov.go.id pada tanggal 8 Februari 2020).

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, (Jakarta:2000).

Negara Bersistem Pendidikan Terbaik Dunia, diakses pada 27 Februari 2020 dari situs : (<http://gaya.tempo.co/read/news/2015/05/15/215666403/ini-10-negara-bersistem-pendidikan-terbaik-dunia>)

Penerimaan PNS Kontrak di Simeulue Tak Ada Titipan Apalagi Siluman diakses pada tanggal 25 Februari 2020 di (<https://modusaceh.co/news/penerimaan-pns-kontrak-di-simeulue-tak-ada-titipan-apalagi-siluman/index.html>)

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1993)
diakses pada tanggal 16 Desember 2019, dari
situs:(<https://kbbi.web.id/kelola>)

Ranking Mutu Pendidikan RI di Dunia Paling Jeblok, diakses di
<https://news.okezone.com/read/2014/05/13/373/984246/rangking-mutu-pendidikan-ri-di-dunia-paling-jeblok> pada tanggal 28 Februari 2020

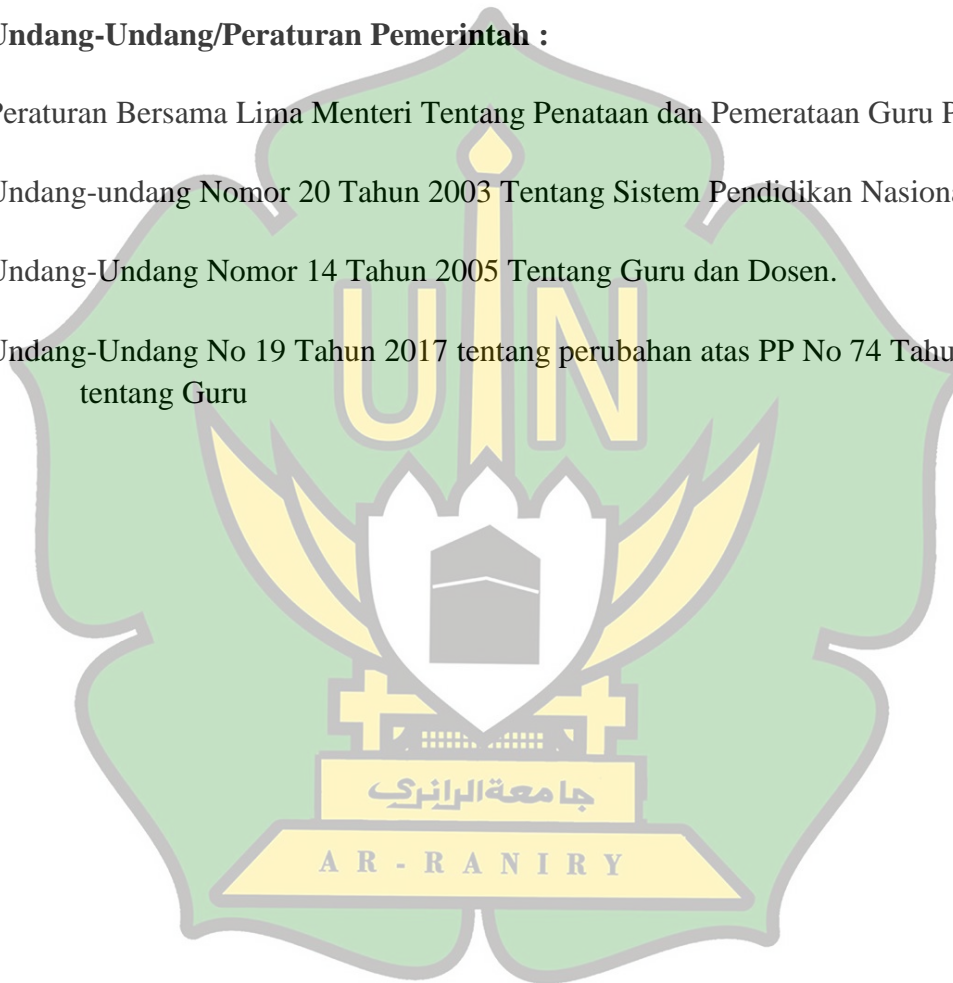
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah :

Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang No 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 Tahun 2008
tentang Guru



LAMPIRAN

Lampiran I

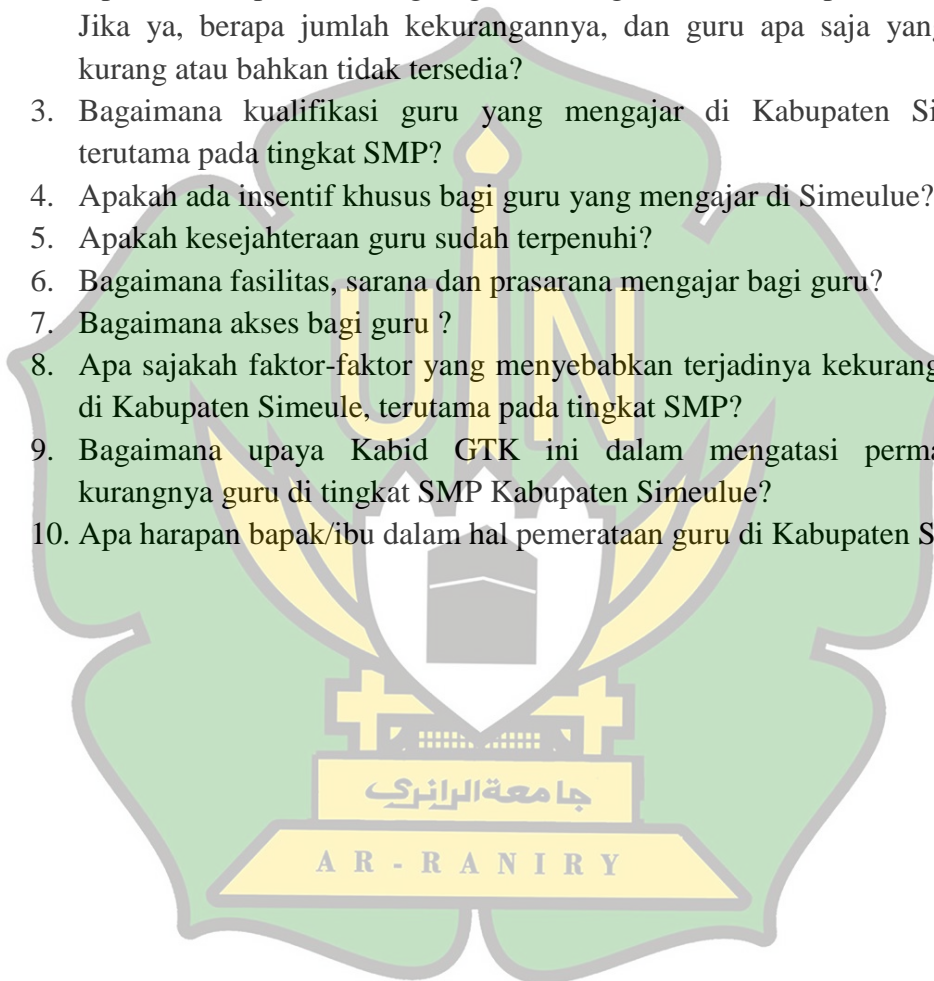
Daftar Wawancara untuk Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris Kabupaten Simeulue:

1. Nama/sejak kapan menjabat menjadi Kepala Dinas/Sekretaris Dinas Pendidikan Simeulue?
2. Bagimanakah keadaan pendidikan di Kabupaten Simeulue? Apakah banyak terdapat kekurangan guru?
3. Perbandingan jumlah sekolah dan jumlah guru di Kabupaten Simeulue (SD, SMP, SMA)
4. Tingkat sekolah manakah yang paling tinggi rasio kekurangan guru? (SD, SMP atau SMA)?
5. Perbandingan jumlah sekolah dan jumlah guru di Kabupaten Simeulue antara di desa dan di kota?
6. Apa saja faktor-faktor penghambat penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue?
7. Bagaimana mekanisme penempatan guru SMP di Kabupaten Simeulue?
8. Ada/tidak Qanun khusus Kabupaten Simeulue mengenai penempatan dan pemerataan guru?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Simeulue dalam mengatasi permasalahan pemerataan Penempatan guru di SMP di Kabupaten Simeulue?
10. Ada/tidak anggaran khusus dari pemerintah Kabupaten Simeulue/Dinas Pendidikan sendiri dalam upaya pemerataan guru di Kabupaten Simeulue?
11. Bagaimana kualifikasi guru yang bisa mengajar di Kabupaten Simeulue?
12. Bagaimana sarana dan prasarana (fasilitas) di sekolah-sekolah di Kabupaten Simeulue? Apakah sudah cukup memadai? Terutama pada tingkat sekolah SMP?
13. Apakah kesejahteraan guru sudah terpenuhi?
14. Apakah selalu dilakukan evaluasi dan pengawasan dalam upaya penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue?
15. Apakah pernah berkunjung secara langsung ke sekolah-sekolah (terutama SMP) untuk mengevaluasi bagaimana keadaan guru dilapangan?
16. Apakah ada sanksi bagi guru-guru ?
17. Apakah akreditasi sekolah berpengaruh terhadap jumlah guru yang tersedia?
18. Apa harapan bapak untuk pendidikan di Kabupaten Simeulue

Lampiran II

Daftar wawancara untuk Kepala bidang Guru Tenaga Kependidikan (Kabid GTK):

1. Nama/sejak kapan menjabat menjadi Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan?
2. Apakah terdapat kekurangan guru di tingkat SMP Kabupaten Simeulue? Jika ya, berapa jumlah kekurangannya, dan guru apa saja yang masih kurang atau bahkan tidak tersedia?
3. Bagaimana kualifikasi guru yang mengajar di Kabupaten Simeulue, terutama pada tingkat SMP?
4. Apakah ada insentif khusus bagi guru yang mengajar di Simeulue?
5. Apakah kesejahteraan guru sudah terpenuhi?
6. Bagaimana fasilitas, sarana dan prasarana mengajar bagi guru?
7. Bagaimana akses bagi guru ?
8. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan guru di Kabupaten Simeule, terutama pada tingkat SMP?
9. Bagaimana upaya Kabid GTK ini dalam mengatasi permasalahan kurangnya guru di tingkat SMP Kabupaten Simeulue?
10. Apa harapan bapak/ibu dalam hal pemerataan guru di Kabupaten Simeule?



Lampiran III

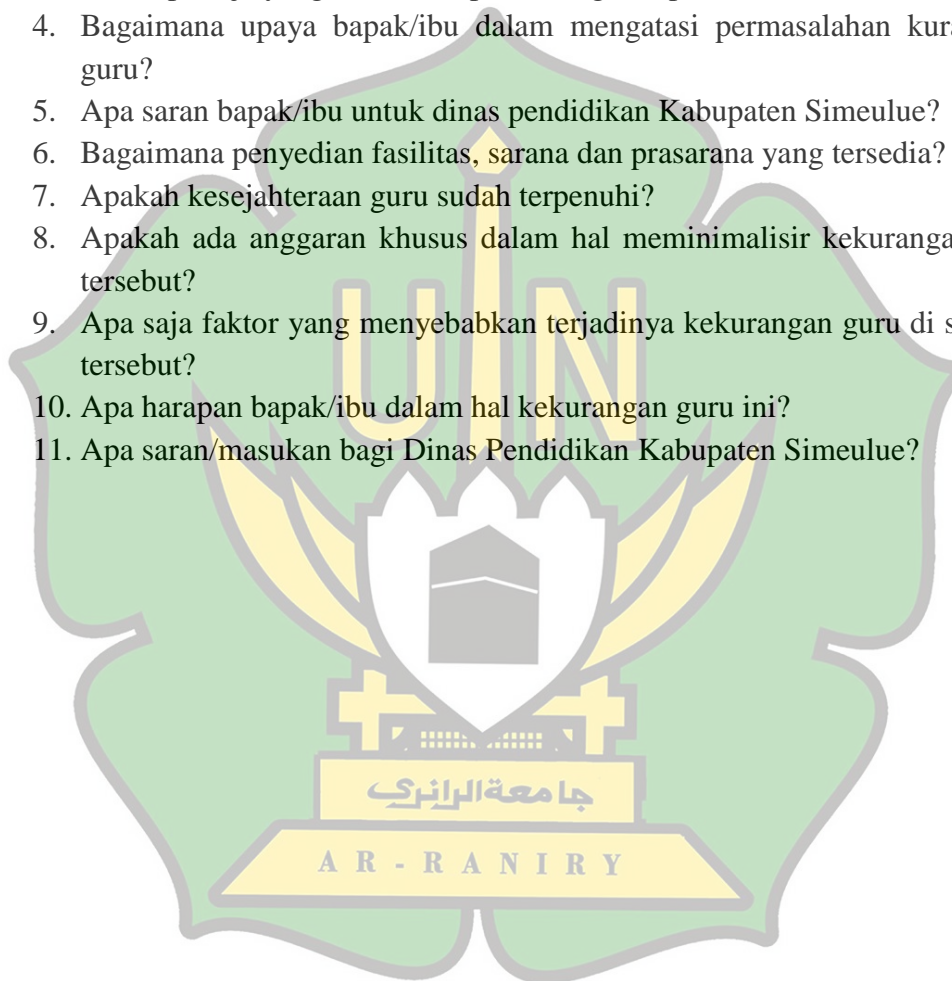
Daftar wawancara untuk Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid DIKDAS)

1. Nama/sejak kapan menjabat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid DIKDAS)?
2. Apakah terdapat kekurangan guru di sekolah-sekolah di Kabupaten Simeulue? Terutama pada bidang pendidikan dasar di tingkat SMP?
3. Tingkat sekolah SMP manakah yang paling tinggi rasio kekurangan guru? (SMP di perkotaan atau di pedesaan)
4. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan guru, terutama pada tingkat SMP di Kabupaten Simeulue?
5. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di setiap Sekolah di Kabupaten Simeulue, apakah sudah terpenuhi?
6. Bagaimana kesejahteraan guru, apakah sudah terpenuhi?
7. Apa saja faktor penghambat dalam mekanisme penempatan dan pemerataan guru di tingkat pendidikan dasar terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)?
8. Bagaimana upaya anda selaku Kabid DIKDAS dalam mengatasi permasalahan kurangnya guru pada tingkat pendidikan dasar, terutama pada tingkat SMP?
9. Apakah selalu dilakukan evaluasi dan pengawasan dalam upaya penempatan dan pemerataan guru di Kabupaten Simeulue?
10. Apakah pernah berkunjung secara langsung ke sekolah-sekolah (terutama SMP) untuk mengevaluasi bagaimana keadaan guru dilapangan?
11. Apakah ada sanksi bagi guru-guru?
12. Apakah akreditasi sekolah berpengaruh terhadap jumlah guru yang tersedia?
13. Apa harapan bapak untuk pendidikan di Kabupaten Simeulue?

Lampiran IV

Daftar wawancara untuk Kepala Sekolah dan Guru SMP di Kabupaten Simeulue

1. Nama/sejak kapan menjabat menjadi Kepala Sekolah/guru di sekolah ini?
2. Apakah terdapat kekurangan guru di sekolah ini?
3. Guru apa saja yang tidak terdapat/kurang dan perlu ditambah?
4. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam mengatasi permasalahan kurangnya guru?
5. Apa saran bapak/ibu untuk dinas pendidikan Kabupaten Simeulue?
6. Bagaimana penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia?
7. Apakah kesejahteraan guru sudah terpenuhi?
8. Apakah ada anggaran khusus dalam hal meminimalisir kekurangan guru tersebut?
9. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan guru di sekolah tersebut?
10. Apa harapan bapak/ibu dalam hal kekurangan guru ini?
11. Apa saran/masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue?



Lampiran V

Daftar wawancara untuk siswa SMP (5 orang dari 5 sekolah berbeda)

1. Nama/kelas/asal sekolah?
2. Apakah terdapat kekurangan guru di sekolah ini? Jika ya, guru apa yang belum tersedia?
3. Bagaimana kualitas guru yang mengajar? Apakah ada guru yang mengajar lebih dari satu pelajaran/ mengajar yang bukan dibidangnya?
4. Bagaimana fasilitas, sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar, apakah cukup memadai?
5. Apa harapan adik-adik kedepannya mengenai permasalahan pendidikan dan kurangnya guru di sekolah ini atau bahkan di Kabupaten Simelue?



Lampiran VI



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Baru No. 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp/Fax (0650) 8001002 Email : jarilknas.sml@gmail.com Kode Pos 23691
SINABANG

Surat Izin Pengumpulan Data

Nomor : 423.41/984/2020

1. Sehubungan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Nomor B-905/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2020, tanggal 06 Mei 2020 tentang Mohon Izin Untuk Mengumpulkan Data Penyusunan Skripsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue memberikan izin Kepada:

Nama : Hayatur Riza
NIM : 150802064
Prodi/Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

1. Untuk melakukan kegiatan obsevasi pengumpulan data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul " Analisis Penempatan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue".
2. Demikian surat izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 08 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

H. RASMIDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda IV/c .
Nip. 19620107 198803 1 001

Lampiran VII



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 SIMEULUE TIMUR
Jln. Baru Desa Suka Karya No. Telp. (0650) 21072 Sinabang

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 422 / 488 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Hayatur Riza
NIM : 150802064
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Simeulue Timur, dengan Judul "Analisis Penempatan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue".

Demikian Surat Pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sinabang, 5 Juni 2020

Kepala Sekolah

AJISMAN, S.Pd

NIP. 196406141984121001

AR-RANIRY

Lampiran VIII



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 TEUPAH TENGAH**

Jln. Simabang-Labuan Bajau Km.10 Desa Simpang Abail kode pos 23691

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 412.2/ 062 /SMP/2020

Kepala sekolah menengah pertama (SMP Negeri 1 Teupah Tengah) dengan ini menerangkan bahwa sebagai berikut :

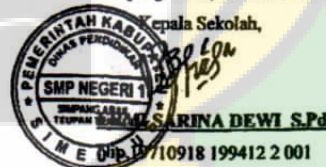
Nama : HAYATUR RIZA
NIM : 150802064
Jurusan : Program study Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Benar yang Namanya Tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan penelitian di SMP Negeri 1 Teupah Tengah pada tahun 2020 dengan Judul : "Analisis Penempatan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Simeulue".

Demikian Surat keterangan ini kami keluarkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Abail, 06 Juni 2020

Kepala Sekolah,



SARINA DEWI S.Pd

Nip. 19710918 199412 2 001

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN





Ajisman, S.Pd
kepala sekolah negeri 1
simeulue timur



Asmawati, S.Pd
kepala sekolah smp negeri 2
simeulue timur



Ardiansyah, S.Pd
guru smp negeri 7 simeulue
timur



hajjattun chairah M.Si
guru smp negeri 1 alafan



Citra Dewi maysarah, S.Pd.,M.Pd
guru smp Negeri 1 simeulue timur



Zulfian, MPD
kepala sekolah smp negeri 7
simeulue timur



fitriah muriwijaya
murid smp negeri 7 simeulue
timur



Fany silvaleza
murid smp Negeri 1 simeulue
timur



miftahul humuri
murid smp Negeri 2 Simeulue
timur



Roy jurianda
murid Smpn2 teupah selatan



جامعة الرانيري

AR-RANIRY